

**IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA JAMBANGAN KECAMATAN BAWANG KABUPATEN  
BATANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam



Oleh:

EVA SETIYOWATI

NIM 1801046040

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2022**

## NOTA PEMBIMBING

Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Eva Setiyowati

NIM : 1801046040

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Judul : **Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat  
Desa Jambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Batang**

Dengan ini kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut oleh karenanya mohon segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 12 Desember 2022

Pembimbing,



**Drs. Kasmuri, M.Ag**

**NIP. 19660822 199403 1 003**

**SKRIPSI**

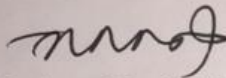
**IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA JAMBANGAN KECAMATAN BAWANG KABUPATEN  
BATANG**

Oleh:  
Eva Setiyowati  
1801046040

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 23 Desember 2022 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

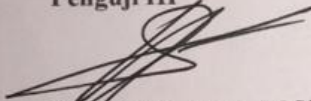
**Susunan Dewan Penguji**

**Ketua/Penguji I**




Dr. Agus Riyadi, S.Sos., M.S.I  
NIP. 1980081620007101003

**Penguji III**



Dr. Sulistio, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19700202021998031005

**Sekretaris/ Penguji II**



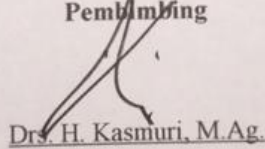
Drs. H. Kasmuri, M.Ag.  
NIP. 196608221994031003

**Penguji IV**



Dr. Nur Hamid, M.Sc.  
NIP. 198910172019031010

Mengetahui  
**Pembimbing**



Drs. H. Kasmuri, M.Ag.  
NIP. 196608221994031003

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada Tanggal 23 Desember 2022



Prof. Dr. H. Iyas Supena, M.Ag.  
NIP. 1972041020011210003

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul ***Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Batang***, adalah hasil darikerjakeras saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi manapun di lembaga pendididkan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan manapun yang belum atau di terbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 12 Desember 2022



Eva Setiyowati

NIM 1801046040

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puj bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang senantiasa telah menganugerahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Batang”**. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan para pengikut beliau yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan hingga sampai zaman terang benderang seperti saat ini dan semoga kita sebagai umat islam mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat nanti.

Karya skripsi yang disusun oleh penulis yaitu dalam rangka untuk mendapatkan gelar sarjana sosial (S,Sos) di jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah Dan komunikasi UIN Walisongo Semarang.

dalam penyusunan skripsi ini tidak lupa penulis mengucapkan puji syukur kepada semua pihak yang ikut serta membimbing dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan segala syukur penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Ilyas Supena, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Agus Riyadi, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
5. Bapak Drs. Kasmuri, M.Ag selaku Wali Dosen dan sekaligus pembimbing skripsi yang selalu sabar, memberikan nasihat, dan motivasi kepada anak bimbingnya.
6. Kepada seluruh dosen fakultas dakwah dan komunikasi UIN Walisongo Semarang yang tidak bisasanya sebutkan namanya stau persatu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan di fakultas dakwah dan komunikasi UIN Walisongo Semarang.
7. Kepada seluruh jajaran staff fakultas dakwah dan komunikasi UIN Walisongo Semarang yang sudah memberikan pelayanan yang baik.

8. Kepada kepala desa jambangan kecamatan bawang yang sudah mengizinkan saya melakukan penelitian untuk skripsi hingga selesai.
9. Teruntuk diri saya sendiri Eva Setiyowati terimakasih sudah menjadi hebat dan kuat dalam menghadapi segala sesuatu yang menjadi penghalang dalam segala proses yang dilalui.
10. Teruntuk ketiga kakak laki-laki saya yang juga memberikan dukungan juga semangat kepada saya dalam menempuh pendidikan di UIN Walisongo.
11. Kedua kakak ipar saya juga yang sudah memberikan support kepada saya, saya sangat berterimakasih kepada kalian.
12. Dan tidak lupa juga kepada keluarga besar saya yang sudah memberikan doa dan dukungan kepada saya sampai detik ini.
13. Kepada teman-temans saya sedari SD hani yang sudah menemani saya dari awal penelitian.
14. Kepada teman-teman sedari SMA yang juga ikut mensupport saya untuk menyelesaikan skripsi ini, saya banyak mengucapkan terimakasih kepada kalian.
15. Kepada keluarga SEMA-F yang sudah mengajarkan banyak hal kepada saya.
16. Kepada sahabat/i rayon dakwah 2018 yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebersamaan yang sedikit banyaknya memberikan hal hal baru kepada saya.
17. Kepada sahabatku yuliana rifani yang selalu mengingatkan saya agar cepat menyelesaikan skripsi, terimakasih <3.
18. Kepada sahabatku juga fitria mira wijayanti,nurul Firdausi nuzula,dhini azizatul ulum, ro'ikhotul mufidah,nova indriyanti yang mana penulis sangat sangat berterimakasih atas semuanya.
19. Kepada teman-teman yang bisa dibilang kenal belum lama tapi sudah sepertikeluarga (kelompok KKN MIT-DR 42).
20. Kepada keluarga besar mahasiswa jurusan pengembangan masyarakat islam UIN Walisongo 2018 yang sudah kebersamai dari awal masuk hingga sampai satu persatu lulus pada waktunya masing-masing.
21. Dan terakhir kepada semua pihak yang sudah membantu maupun memberikan dukungan dan belum bisa penulis sebutkan namanya, terimakasih semuanya.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah dalam penyusunan skripsi ini dengan segala kerja keras, ketekunan, kesabaran, motivasi, semangat, serta dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa motivasi, dukungan serta doa tentunya penulis akan kesulitan untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan rendah hati karya ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, Ayah saya (subandri) dan Ibu saya (musiyam), ketiga kakak alki-laki saya sugeng riyadi, akrom mualimin, dan khoirul nafi, seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi S1 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
2. Kepada almamater tercinta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang khususnya Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmu, pengalaman serta pengetahuan yang sangat luar biasa untuk penulis.

## MOTTO

قَدْ رَأَىٰ شَيْءٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ لِّكَ اللهُ جَعَلَ قَدْ أَمْرًا بِالْعُ اللهِ ۗ إِنَّ حَسْبُهُ فَهُوَ اللهُ عَلَىٰ يَتَوَكَّلُ وَمَنْ يَحْتَسِبْ لَا حَيْثُ مِنْ وَيَرْزُقُهُ

“Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

QS At-Thalaq 3



## ABSTRAK

Nama : Eva Setiyowati

Nim : 1801046040

Judul : Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Jambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Batang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberdayaan masyarakat yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), yang mana ditahun ini kurang berjalan dengan baik terlebih pada pelaksanaan program-program pemberdayaan di desa Jambangan dikarenakan masih terdapat faktor-faktor pengmabat dalam proses Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pemberdayaan Masyarakat. Serta untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pemberdayaan Masyarakat di desa Jambangan Kecaamatan Bawang Kabupaten Batang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam peneltian ini yaitu data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan tiga cara melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitin ini juga peneliti terlibat langsung dalam penggalian data dan analisis data yang digunakan menggunakan teori Miles and Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. belum berjalan dengan baik, yang mana dapat dilihat dari kegiatan program pemeberdayaan yang belum terlaksana dengan maksimal. Adapun faktor penghambat dan pendukung Implementasi Alokasi Dana Desa. faktor penghambat yaitu kurangnya SDM pada aparatur desa, nominal yang masih terbilang kecil menyebabkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Masih banyak masyarakat yang kurang menaruh perhatian pada proses implementasi alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat. Pencairan dan penyaluran yang tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dari awal menyebabkan awal menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan terkhusus kegiatan pemberdayaan masyarakat juga ikut terhambat yang mana seharusnya dapat dilaksanakan secara seimbangan. Sedangkan faktor pendukung dalam Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu partisipasi dari masyarakat desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Jambangan Kecamatan bawang Kabupaten Batang.

***Kata Kunci: Implementasi, Alokasi Dana Desa (ADD), Pemberdayaan Masyarakat***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING .....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tujuan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Manfaat Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Manfaat teoritis.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Manfaat praktis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Tinjauan Pustaka .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Metode Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Jenis dan Pendekatan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Sumber dan jenis data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Teknik pengumpulan data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. keabsahan Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5. Teknik Analisi Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

G. Sistematika Penulisan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Implementasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Implementasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Alokasi dana desa.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Alokasi Dana Desa .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Pemberdayaan Masyarakat .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Tahapan Pemberdayaan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Metode Pemberdayaan Masyarakat .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5. Prinsip – Prinsip Pemberdayaan Masyarakat .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III DATA PENEITIAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Gambaran Umum Desa Jambangan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Kondisi Geografis dan Batas Wilayah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Kondisi Demografis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Kondisi Ekonomi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Kondisi Potensi desa Jambangan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5. Sumber Daya desa Jambangan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6. Sosial budaya.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
7. Kondisi keagamaan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
8. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Jambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Batang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Jambanagn Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Kegiatan Ibu-Ibu PKK .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Pemberdayaan di bidang olahraga .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Kegiatan Karang Taruna .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Faktor Penghambat Dan Pendukung Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Jambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Batang....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
1. Faktor Penghambata .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Faktor Pendukung .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Jambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Batang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

B. Analisis Faktor Penghambat Dan Pendukung Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Jambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Batang  
**Error! Bookmark not defined.**

**BAB V PENUTUP** .....Error! Bookmark not defined.

1. KESIMPULAN .....**Error! Bookmark not defined.**

2. SARAN .....**Error! Bookmark not defined.**

**DAFTAR PUSTAKA**.....Error! Bookmark not defined.

**LAMPIRAN - LAMPIRAN** .....Error! Bookmark not defined.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP** .....Error! Bookmark not defined.

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 .....	25
Tabel 2.2 .....	26
Tabel 2.3 .....	27
Tabel 3.1 .....	28
Tabel 4.1 .....	30
Tabel 5.1 .....	32
Tabel 6.1 .....	39

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.....	24
Gambar 2.1.....	29
Gambar 2.2.....	31
Gambar 3.1.....	40



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Desa adalah wilayah negara tempat tinggal sekelompok orang yang juga memiliki batas-batas teritorial tertentu, Dengan perkembangan waktu dan teknologi yang lebih maju, maka Pemerintah semakin sulit mengelola begitu banyak wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, dalam aturan Perundang-undangan dijelaskan Kekuatan yang diberikan kepada desa saat ini bisa mengurus rumah sendiri. Ketentuan ini telah disesuaikan Situasi dan kondisi di zaman modern ini mempermudah pekerjaan pemerintah pusat mengelola dan mengawasi masing-masing wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa sendiri Keterlibatan masyarakat sangatlah diperlukan yang juga disebut dengan pemberdayaan masyarakat.<sup>1</sup>

Desa merupakan salah satu sektor perekonomian yang potensial bagi suatu negara. Disini banyak potensi yang bisa dikembangkan, selain itu juga banyak sumber daya alam yang tersedia di dalamnya. Pemberdayaan masyarakat dipedesaan sebenarnya sudah lama dijalankan oleh pemerintah semenjak orde baru, apalagi sejak di berlakukannya kebijakan otonomi daerah, namun tingkat keberhasilannya belum tercapai secara maksimal. Salah satu faktor yang paling dominan adalah peran pemerintah terlalu besar, sehingga menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan memanfaatkan potensi lokal. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan dengan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga membuat masyarakat tidak mandiri. Pemberian kekuasaan pada inisiatif lokal dan partisipasi masyarakat menjadi kata kunci dalam pengembangan masyarakat.<sup>2</sup>

Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang memiliki kemampuan meskipun masih terbatas. Sebagai subjek masyarakat, harus menjadi pelaku dan penentu keputusan dalam proses perencanaan agar mereka lebih

---

<sup>1</sup> Mohammad Said Risya Novita Sari, Heru Ribawanto, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Prespektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri)," *Jurusan Administrasi Publik* 3, no. 11 (n.d.): 1880.

<sup>2</sup> Sugiarto dkk, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Tanah Pekarangan (PTP) untuk Konservasi dan Wirausaha Agribisnis di Kelurahan Kedung Pane Kota Semarang", *Jurnal Ilmu Dakwah* Volume 17, No 2(2017). Diakses tanggal 10 November 2022



berdaya dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan. Namun, kemampuan dan pengalamannya dalam penyusunan kajian dan perencanaan program pemberdayaan masih serba terbatas, apalagi untuk masyarakat pedesaan mereka harus dibantu, didorong, didampingi dan ditingkatkan kemampuannya karena masyarakat pedesaan masih sedikit sulit menerima budaya modernisasi, sulit menerima teknologi baru, tidak mempunyai motivasi kuat dan cukup dengan pemenuhan kebutuhan kebutuhan pokok yang paling dasar. Peraturan desa antara lain bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa dengan tujuan kesejahteraan bersama, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.<sup>3</sup>

Peningkatan kesejahteraan dapat dilihat dari semakin banyaknya kebutuhan yang dapat dipenuhi dan disuplai oleh masyarakat sendiri. Berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, dalam setiap masyarakat tersedia sumber dan potensi yang dapat dimanfaatkan. Setiap wilayah memiliki sumber dan potensi yang berbeda satu sama lain, dimana potensi tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga terutama masyarakat pedesaan yang mayoritas penduduknya mengandalkan penghasilannya dari potensi alam yang ada.<sup>4</sup>

Menurut pandangan Macherdrawati dalam kutipan Agus Riyadi, secara terminologis pengembangan dan pemberdayaan masyarakat islam berarti menyusun dan melembagakan semua segi ajaran Islam, berarti mengubah dan melembagakan semua segi ajaran Islam kedalam kehidupan keluarga (*usrah*). Sehingga kelompok dan masyarakat mengubah dan melembagakan semua segi ajaran Islam dalam kehidupan keluarga (*usrah*) kelompok masyarakat.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hal asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

---

<sup>3</sup>Eko Apriantono, "*Memajukan Ekonomi Desa Melalui Bumdes*". (Bandung: Fakultas Ekonomi, 2016), hlm. 20.

<sup>4</sup> Nain Umar, *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris*, (Makassar: Garis Khatulistiwa, 2019), hal. 23.

<sup>5</sup>Agus Riyadi , "Formulasi Model Dakwah Pengembangan Masyarakat Islam," *Jurnal Komunikasi Islam*, (Vol.6, No.2, 2014).

Republik Indonesia. Yang mana disetiap desa mendapatkan sumber penerimaan desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dan dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% yang disebut dengan Alokasi Dana Desa. Selanjutnya, anggaran Alokasi Dana Desa akan digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan juga pembangunan ditingkat pedesaan. Oleh karena itu, jika anggaran di kelola dengan sangat baik dan jujur maka hasil kegiatan otonomi desa, khususnya pada pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, diperlukan juga adanya kerja sama yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan Alokasi Dana. Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan yaitu untuk pemberdayaan masyarakat

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu adanya komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana

1. Desa bukan hanya sekedar sebagai objek penerima manfaat, melainkan juga dapat memberikan manfaat bagi warga masyarakat setempat
2. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan asset local sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat setempat
3. Desa mempunyai kemampuan menghasilka dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar dll.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Chabib Sholeh, *Pengelolaan Keuangan Desa*, FOKUS MEDI (Bandung, 2015). hlm.54.

Selain melibatkan masyarakat dalam pengimplementasian Alokasi Dana Desa juga melibatkan beberapa stakeholder seperti karang taruna, tim penggerak PKK, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Stakeholder tersebut diharapkan mampu untuk saling bekerja sama dalam pelaksanaan alokasi dana desa.<sup>7</sup>

Pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang sangat penting yang harus dilaksanakan oleh aparatur desa, dimanapun untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa salah satunya adalah dengan melakukan pengelolaan keuangan secara lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>8</sup>

Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud untuk membiayai program pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun besaran dana ADD masih terbilang terbatas, namun telah mampu menjadi dorongan bagi pelaksanaan kegiatan.<sup>9</sup>

Dalam mendukung warga desa untuk melaksanakan tugasnya, Tata kelola dan pemberdayaan di semua aspek masyarakat pedesaan Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana Desa dianggarkan setiap tahun dalam APBN setiap desa berfungsi sebagai sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian semua anggaran mulai dari pemerintah hingga desa-desa yang ada. Dana desa dihitung dan dialokasikan sesuai dengan jumlah desa Melihat:

1. Jumlah penduduk (10%).
2. Tingkat kemiskinan (50%).
3. Luas (10%).

---

<sup>7</sup> Faizatul Karimah, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 4 (n.d.): 597–598.

<sup>8</sup> Yosefa Sayekti Dina Rulyanti, Raden Andi Sularso, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening", Bisma:," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 11, no. 3 (2018): 326.

<sup>9</sup> Ray Septianis Kartika, "Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Lokasi Dana Desa (ADD)," *Jurnal Bina Praja* 8, no. 2 (2012): 180.

#### 4. Kesulitan geografis (30%).<sup>10</sup>

Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan di kabupaten batang yaitu salah satunya berada di Desa Jambangan, Desa ini sebuah daerah yang berada di dataran tinggi kabupaten batang tepatnya di kecamatan Bawang. Di Desa Jambangan ini sendiri memiliki 6(enam) wilayah/pedukuhan yaitu:

1. Dukuh : Mulyodadi
2. Dukuh : Mulyosari
3. Dukuh : Jambangan
4. Dukuh : Madukoro
5. Dukuh : Manggis
6. Dukuh : Kenteng

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis sehingga penulis tertarik untuk mendeskripsikan sejauh mana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) itu untuk kepentingan Pemberdayaan Masyarakat. dengan melihat fenomena yang terjadi di kelurahan jambangan kecamatan bawang kabupaten batang tersebut. maka dengan ini peneliti melakukan penelitian dengan judul “ Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Batang”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pemberdayaan Masyarakat.
2. Faktor apa yang menjadi penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pemberdayaan Masyarakat.

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pemberdayaan Masyarakat.

---

<sup>10</sup> Kementrian Keuangan RI, “*Buku Pintar Dana Desa*”, Jakarta: Kemenkeu, 2017. hlm. 40.

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pemberdayaan Masyarakat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang ada yaitu dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

##### **1. Manfaat teoritis**

Semoga penelitian ini bisa menambah wawasan, ilmu dan pengetahuan kepada pembaca dan nantinya bisa dijadikan bahan acuan atau referensi untuk penulis lainnya, jurusan pengembangan masyarakat Islam dan sebagai bahan acuan studi banding yang nantinya akan dilakukan oleh peneliti lainnya.

##### **2. Manfaat praktis**

###### **a) Bagi Pembaca**

Bagi pembaca semoga dapat menambah wawasan mengenai proses penyaluran dana desa khususnya di bidang Pemberdayaan Masyarakat desa.

###### **b) Bagi penulis lain**

Semoga dengan adanya penelitian ini bisa menambah wawasan dan juga informasi terkait implementasi alokasi dana desa dibidang pembangunan infrastuktur desa dan juga dapat memberikan manfaat bagi penulis yang akan datang terkait implementasi alokasi dana desa dalam Pemberdayaan Masyarakat desa.

###### **c) Bagi Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini semoga bisa menjadi bahan referensi untuk mahasiswa yang sedang atau akan membuat proposit yang berkaitan dengan Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) khususnya di bidang Pemberdayaan Masyarakat desa.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian lain, maka penulis mengemukakan beberapa karya peneliti yang telah melakukan penelitian terkait judul diatas yaitu :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Evliyani pada tahun 2018 yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Wayhayu Kecamatan Bangkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat”. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat melalui program anggaran dana desa di desa wayharu dan untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat pemberdayaan masyarakat melalui program anggaran dana desa di desa wayharu. metode penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan yang dilakukan pada masyarakat yang sebenarnya untuk menemukan realitas apa yang tengah terjadi mengenai masalah tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode interview, metode observasi, dan dokumentasi.

Kedua, jurnal ini ditulis oleh Muhammad Ardyansyah Makmur pada tahun 2020, dengan judul “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Matrio Bulu Kabupaten Pinrang”. Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif menuturkan dan menafsirkan data yang berkenan dengan fakta, keadaan variabel yang terjadi saat peneliti berlangsung dan menunjukkan apa adanya. Dengan populasi penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat miskin yang ada di desa tersebut. Adapun teknik penarikan sampelnya agar representatif akan dilakukan dengan menggunakan teknik stratified sampling yaitu pengambilan anggota sampel pada semua wilayah yang ada dan selanjutnya besarnya anggota sampel yang diambil di setiap wilayah desa ditetapkan dengan menggunakan rumus dari Nazir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan alokasi dan desa dalam pemberdayaan masyarakat miskin di kecamatan matrio bulu berjalan dengan baik ditinjau dari dimensi organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kepala desa dan perangkat desa melaksanakan tugas dan fungsinya yang di tunjang dengan sumber daya manusia serta pelaksanaan koordinasi terjalin dengan baik.

Ketiga, jurnal disusun oleh Masriyani, Hisbah, dan Feri Setiawan yang berjudul “

Implementasi Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Dalam pendekatan penelitian ini ditunjukkan guna memahami seberapa jauh efektifitas penerapan hukum pada lingkungan kemasyarakatan, sehingga dapat dikatakan untuk mengetahui kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*. Sumber data penelitian ini yaitu penelitian lapangan dilaksanakan melalui wawancara langsung pada responden dengan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang bertujuan dalam mendapatkan data yang akurat serta tepat berdasarkan sumber yang ditentukan terdahulu, dan dari itu seluruh jawaban ataupun keterangan yang didapatkan tentang suatu hal yang dikehendaki di rekam ataupun dicatat. Metode analisis data yang digunakan melalui pengumpulan data, yaitu data sekunder maupun data primer diklasifikasikan dan diseleksi secara yuridis, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini terkait implementasi alokasi dana desa di desa mudung darat kabupaten muaro jambi ini sudah berjalan sesuai dengan perda kabupaten muaro jambimengeinai tata cara pembagian dana penetapan rincian alokasi dana desa .

Keempat, jurnal yang disusun oleh Endang Siti Rukmana Lapi, Slamet Muchsin, dan Suyeno dengan judul : *Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu Kabupaten Batu)*". Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif menurut bogdan dan tylor sebagaimana dikutip moleong mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati. Sumber data yang digunakan yaitu jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan model analisis miles dan huberman, yang mana model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari penelitian ini program yang dijalankan terkait pemberdayaan masyarakat sudah cukup baik sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan upaya yang dilakukan oleh aparatur desa dengan melakukan beberapa program. Dengan berbagai factor yang ada yaitu sumber daya manusia masih rendah dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai

dalam pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mengurangi hasil produktif. Adapun tanggung jawab aparatur desa dalam pengelolaan dana desa, maka harus bisa mendekati diri pada masyarakat dan memberikan arahan kepada masyarakat tentang dana yang dialokasikan untuk desa secara transparan dan mengadakan program yang lebih baik lagi dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia. Sarana dan prasarana juga harus disesuaikan dengan kebutuhan desa dan juga menunjang program pemberdayaan masyarakat agar dapat berjalan sesuai harapan. Sehingga dapat memajukan ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kelima, Jurnal yang disusun oleh Zahnudin Nurhidayatullah Dwi Prasetyo, Dg. Pabalik, dan Wisang Candra Bintari dengan judul “Implementasi Alokasi Dana Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Malawele Kabupaten Sorong. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Unoversitas Muhammadiyah Sorong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrument studi pustaka, observasi, dan wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas masalah atau focus yang akan diteliti. Dalam masalah yang ingin diteliti dengan fenomena yang ada dalam implementasi alokasi dana kelurahan. Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi alokasi dana kelurahan di kelurahan mulawele dapat dikategorikan baik. Hal ini dinilai dari pelaksanaan tiap tahapan implementasi yang sebagian besar sudah sesuai dengan peraturan. Dan dalam implementasi alokasi dana kelurahan ini ditemukan beberapa hambatan yang berasal dari internal maupun eksternal.

Keenam, Jurnal yang di tulis oleh Ahmad Falih Andikan dengan judul “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Rangka Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang”. Jurusan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlanga Surabaya. Adapun tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran implementasi pelaksanaan alokasi dana desa dikecamatan jombang kabupaten jombang dan mengidentifikasi factor-faktor yang menyebabkan tidak berfungsinya lembaga kemasyarakatan desa dan partisipasi



masyarakat di lihat dari variabel komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi serta tujuan kebijakan. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ADD ini telah terpenuhi, yaitu semua desa dapat melaksanakan kegiatan alokasi dana desa dengan cukup baik. Dengan beberapa factor pendorong diantaranya yaitu, adanya sosialisasi yang dilakukan oleh tim kabupaten, pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar, dan terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan. Dan factor penghambatnya yaitu sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan ADD belum ada, sehingga pemahaman masyarakat mengenai ADD kurang. Yang mana hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD maupun dalam pengawasan.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Torkis Harahap dengan judul “Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat Tani di Desa Payaombur Kecamatan Hutaraja Kabupaten Padang Lawas”. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa, dan untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi lapangan yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan, mengelola, menyajikan, dan menjabarkan hasil penelitian dilapangan kemudian di kumpulkan, serta diolah dan dianalisis dengan menggunakan tabel tunggal, sehingga dapat dibaca dengan mudah untuk mengetahui jawaban yang diteliti. Dari penelitian ini pada bab-bab yang menjelaskan terkait Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat Tani di Desa Payaombur Kecamatan Hutaraja Kabupaten Padang Lawas. Dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten alokasi dana desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang

program-program desa. Pengelolaan keuangan baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat pemerintah desa.

## F. Metode Penelitian

Dari Penelitian ini terdapat (1) jenis dan pendekatan penelitian, (2) sumber dan jenis data. (3) teknik pengumpulan data, dan (4) teknik analisis data.

### 1. Jenis dan Pendekatan

Jenis dan Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang dilakukan secara alamiah, dan bertujuan memberikan pengertian terkait beberapa hal<sup>11</sup>. Metode penelitian ini yaitu metode yang berlandaskan pada realitas sosial dan hubungan yang bersifat interaktif. Dimana metode penelitian ini terdiri dari lokasi penelitian, tipe dan dasar penelitian, sumber data, penentuan informan teknik pengumpulan data dan metode analisis data<sup>12</sup>. Dari jenis dan pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dalam penelitian ini agar bisa mendapatkan data dan informasi mengenai implementasi alokasi dana desa di kelurahan jambangan kecamatan bawang kabupaten batang tersebut.

### 2. Sumber dan jenis data

Ada dua macam jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder.

#### a) Sumber data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber informasi dalam bentuk catatan hasil dari wawancara dan juga dokumentasi. dalam hal ini penulis menggunakan metode tersebut agar mendapatkan data-data juga informasi lain terkait implementasi alokasi dana desa di kelurahan jambangan. Sumber data primer ini yaitu implementasi alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dan juga warga masyarakat setempat di desa jambangan yang dijadikan sebagai tambahan sumber informasi.

---

<sup>11</sup> Koariah Satori, *'Metodologi Penelitian Kualitatif'* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 23-24.

<sup>12</sup> Sugiono, , *'Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D'* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 246.

b) Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data tertulis yang mana dari data ini bisa dilihat keaslian dari data tersebut dan bisa dipertanggung jawabkan. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari buku, jurnal maupun dari hasil penelitian terdahulu yang mana penelitian tersebut memiliki keterkaitan dalam penelitian ini.

### 3. Teknik pengumpulan data

a) Wawancara

Metode wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan tanya tanya jawab secara lisan dan bertatap muka dengan siapa saja yang diwawancarai. Seperti yang dikemukakan Sutrisno Hadi mengatakan wawancara adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan sistematis dan berlandaskan dengan tujuan penelitian<sup>13</sup>. Dalam penelitian ini digunakan interview bebas terstruktur, yang artinya pewawancara hanya membuat pertanyaan secara garis besarnya saja<sup>14</sup>.

b) Observasi

Observasi yaitu sebuah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja terkait fenomena sosial yang kemudian dilakukan pencatatan<sup>15</sup>. Dalam melakukan penelitian ini peneliti beberapa kali datang langsung ke kelurahan jambangan untuk melakukan pengamatan dan saat melakukan pengamatan di sana peneliti menggunakan alat bantu kamera dan recorder untuk mendapatkan informasi terkait dengan apa yang diteliti.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai suatu hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen dan sebagainya<sup>16</sup>. Dalam hal ini peneliti

---

<sup>13</sup> Sugiono, , 'Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D' (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 246.

<sup>14</sup> S. Nasution, 'Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif' (Bandung: PT. Tariso Bandung, 2003), hlm.

<sup>15</sup> Joko Subagyo, 'Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)' (Jakarta: PT. Asdi Mahasaty (Cetakan Kelima), 2006), hlm. 63.

<sup>16</sup> Suhartini Arikunto, 'Prosedur Penelitian' (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 229.

menumpulkan data berupa catatan, arsip, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan tentang penelitian ini.

#### **4. Keabsahan Data**

Pada penelitian kualitatif, keabsahan data lebih bersifat sejalan seiring dengan proses penelitian itu berlangsung. Keabsahan data kualitatif harus dilakukan sejak awal pengambilan data, yaitu sejak melakukan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penulis menggunakan tiga metode triangulasi, yaitu :

##### a) Triangulasi Sumber

Pertama menggunakan trigulasi sumber, triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Pada penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data tentang Implementasi Alokasi Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat. Data dari sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, melainkan data dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

##### b) Trigulasi Teknik

Kedua menggunakan triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, kemudian di cek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandang yang berbeda-beda.

##### c) Triangulasi Waktu

Ketiga menggunakan triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih semangat, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang

sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

## 5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori. Menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Sugiono, Model Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis dan kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data yang diperoleh dapat dikatakan sudah jenuh. Aktivitas dalam pelaksanaan analisis data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### a) Reduksi Data (Data Reduction)

Metode analisis data ini dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari pola dan temanya, dan membuang yang tidak perlu<sup>17</sup>. Dengan demikian data yang telah direduksikan akan memberi gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya agar jelas dan rinci.

Hasil observasi dilapangan kemudian direduksi, menyederhanakan data, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, diberi susunan yang sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberikan gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan<sup>18</sup>. Setelah mendapatkan berbagai data dalam lapangan, peneliti mereduksi data-data yang tidak penting dan memfokuskan pada data-data yang penting sesuai dengan tema yaitu Implementaasi Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Jambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Batang.

### b) Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya penyajian data dalam penelitian

---

<sup>17</sup> Sugiono, 'Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D, 335.

<sup>18</sup> Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: PT. Tariso Bandung, 2003), hlm. 129.

kualitatif biasanya dipaparkan berupa teks berbentuk narasi<sup>19</sup>. Dengan adanya penyajian data tersebut akan memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi, dan juga dapat merancang langkah selanjutnya untuk merencanakan program kerja berdasarkan apa yang telah ia pahami.

Adapun data yang disajikan peneliti yaitu data tentang Implementasi Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Kelurahan Jambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Batang.

c) Penarikan kesimpulan atau verifikasi (Conclusion Drawing or Verification)

(Conclusion or Drawing or Verification) Dikatakan sebagai penarikan kesimpulan atau verifikasi<sup>20</sup>. Dalam hal ini, penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan dengan cara pengolahan terhadap pengumpulan data yang diperoleh dalam proses penelitian untuk memunculkan deskripsi tentang Implementasi Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Kelurahan Jambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Batang.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan agar dapat dipahami oleh pembaca tentang skripsi, maka peneliti membagi menjadi beberapa BAB sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan Pada BAB ini terdiri dari pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Rangkaian ini digunakan peneliti untuk membantu mempermudah dalam penelitian.
- BAB II** : Metode penelitian, pada BAB ini berisi mengenai jenis dan sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data, dan jadwal penelitian
- BAB III** : Gambaran umum lokasi penelitian, BAB ini berisikan tentang sejarah desa jambangan, kondisi geografi desa jambangan, dan tata pemerintahan

---

<sup>19</sup> Sugiono, 'Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D' (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 341.

<sup>20</sup> Sugiono, 341.

desa jambangan.

**BAB IV** : Analisis dan pembahasan, di dalam BAB ini berisikan tentang strategi implementasi alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa di kelurahan jambangan, kecamatan bawang kabupaten batang.

**BAB V** : Penutup BAB ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 1. Implementasi

Implementasi merupakan penerapan suatu kegiatan yang sudah direncanakan dengan begitu matang. implementasi juga biasanya dilakukan secara perencanaan yang sudah dianggap sempurna<sup>21</sup>. implementasi bisa dilakukan juga setelah seluruh kegiatan yang direncanakan sudah dianggap benar<sup>22</sup>. Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai serta memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif.<sup>23</sup>

Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle juga menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Adapun Van Metter dan Van Horn, menyebutkan ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

- a) Standar dan sasaran kebijakan
- b) Sumberdaya
- c) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
- d) Karakteristik agen pelaksana
- e) Kondisi-kondisi sosial ekonomi, dan politik

Sedangkan G. Shabir Cheema dan Denis A. Rondinelli menyatakan bahwa ada empat variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dampak suatu program, yaitu :

- a) Kondisi lingkungan
- b) Hubungan antar organisasi untuk implementasi program
- c) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Meter and Horn

---

<sup>21</sup> Nurdin Usman, 'Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum,' 2002.

<sup>22</sup> E. Mulyasa, 'Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksar, 2013).

<sup>23</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2004).



bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (policy stakeholders)<sup>24</sup>. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan atahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edward III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuatan kebijakan<sup>25</sup>. tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat<sup>26</sup>.

## 2. Alokasi dana desa

Djaenuri mengatakan Alokasi Dana Desa adalah dana yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan desa<sup>27</sup>.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa terdapat pada undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pasal 212 ayat(3) mengenai keuangan desa sumber pendapatan desa terdiri dari:

- a) Pendapatan asli desa
- b) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
- c) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota
- d) Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
- e) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga

Undang-undang No.6 tahun 2014 pasal 72 ayat 1 (d) dan ayat 4 tentang desa

---

<sup>24</sup> Merilee S Grindle, 'Politics and Policy Implementation in the Third World', in *Politics and Policy Implementation in the Third World* (Princeton University Press, 2017), hlm. 7.

<sup>25</sup> Rendal B. and Grace A. Franklin Ripley, "Police Implementation and Bureaucracy," in *Chicago-Illionis* (the Dorsey Press, 1986), 15.

<sup>26</sup> George C Edwards III, 'Public Policy Implementing', ed. Malcolm L et Al Goggin (London-England: Jai Press Inc, 1990), hlm. 1.

<sup>27</sup> M Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah: Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah* (Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 26.

menyatakan pemerintah mengamanatkan keuangan pusat pendapatan desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten kota untuk desa paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa mengacu pada asas

a) Asas Merata

Asas merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM).

b) Asas Adil

Asas Adil adalah besarnya ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, kemiskinan pendidikan dasar, kesehatan), selanjutnya disebut alokasi dana desa proporsional. Besarnya presentase perbandingan antara asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADD adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD<sup>28</sup>.

Pengelolaan Keuangan Desa: konsep dan teori Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Pasal 93 Tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

- (a) Perencanaan Pengertian Perencanaan pembangunan menurut Yabbar dan Hamzah (2015) adalah Proses tahapan kegiatan untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (b) Pelaksanaan Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan implementasi APBDesa. Tahap pelaksanaan adalah Suatu kegiatan untuk menjalankan APB Desa dalam satu tahun anggaran periode biasanya dari awal tahun tanggal 1 Januari hingga akhir tahun tanggal 31 Desember.

---

<sup>28</sup> PP Nomor, "Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab VIII Pasal 43 AD," n.d.

- (c) Penatausahaan Penatausahaan adalah Suatu kegiatan dalam bidang keuangan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip, standar serta prosedur sehingga memperoleh informasi mengenai keuangan. Hasil dari penatausahaan adalah pemberitahuan/laporan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
- (d) Pelaporan Pelaporan adalah Suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode sebagai wujud pelaksanaan pertanggungjawaban atas kewajiban yang diberikan.
- (e) Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah Desa merupakan ukuran yang digunakan dalam menghitung tingkat kesesuaian pelayanan diselenggarakan dengan ukuran nilai atau norma yang berlaku di masyarakat.<sup>29</sup>

Pada dasarnya, setiap desa mendapatkan Alokasi Dana Desa sesuai dengan porsi masing-masing. Selanjutnya disebutkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut:

- (a) Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip; dari, oleh dan untuk masyarakat.
- (b) Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (c) Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (d) Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalur musyawarah.
- (e) Alokasi Dana Desa harus dicatat didalam Anggaran pendapatan dan belanja desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> Galih Wicaksono. dkk. Boedijono, "Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Desa," *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, (2018).

<sup>30</sup> Andini Winariant, "Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Kabupaten Gowa," 2020, 73.

Adapun dasar hukum tentang Alokasi Dana Desa (ADD), sesuai dengan amanat Undang-Undang Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan public, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan di segala bidang kehidupan.<sup>31</sup>

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelesaian masalah yang berskala desa secara langsung maupun yang berskala daerah secara tidak langsung. Salah satu strategi pemerintah untuk membenarkan agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan ADD adalah 30% untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintah desa.<sup>32</sup>

Alokasi dana desa akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan dana alokasi desa yang diterimanya. Dalam rangka ini, diperlukan adanya kerja sama yang saling mendukung keterlibatan masyarakat

desa dalam proses pembangunan desa dan masyarakat desa. Semua pihak tanpa kecuali seperti masyarakat desa, pemerintah desa, kepala desa, Badan Perwakilan Desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

### 3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar memiliki kemampuan dan dapat mengontrol lingkungannya. Pemberdayaan dapat diartikan juga sebagai pemberi daya (empowerment) atau penguatan (stengening).<sup>33</sup>

Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu: pengembangan (enabling), memperkuat potensi atau daya, dan terciptanya kemandirian.

---

<sup>31</sup> Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Prespektif Hukum*, Rajawali P (Jakarta, 2009).176.

<sup>32</sup> Juliska Bara, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)*, hlm. 3.

<sup>33</sup> Dkk Aprilia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 117.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka pemberdayaan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat yang tidak memiliki daya, tetapi dapat diberikan juga kepada masyarakat yang memiliki daya, namun masih terbatas untuk mencapai kemandirian. Karena itu, daya dan potensi masyarakat harus digali dan dikembangkan. Pemberdayaan dilakukan dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki kemudian berupaya untuk mengembangkannya. Namun, pemberdayaan hendaknya tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat, sebaliknya pemberdayaan harus mengantarkan pada proses kemandirian. Pemberdayaan memberikan tekanan pada pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat. Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Dengan demikian, pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai objek melainkan juga sebagai subjek.

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto membagi tiga tahapan pemberdayaan, yaitu: penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Pada tahap penyadaran, masyarakat yang menjadi subjek pemberdayaan diberi penyadaran bahwa setiap manusia mempunyai potensi yang dapat dikembangkan.<sup>34</sup>

Pemberdayaan merupakan salah satu proses dalam pembangunan merujuk pada kemampuan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan kelompok-kelompok yang lemah dalam masyarakat.<sup>35</sup>

Pemberdayaan merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dan mencerminkan pertahapan kegiatan atau upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya, berkekuatan, dan berkemampuan menuju keberdayaan. Makna “memperoleh” daya, kekuatan atau kemampuan merujuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan, atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat harus menyadari akan perlunya memperoleh daya tahu

---

<sup>34</sup> Dinar Wahyuni, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa,” *Jurnal Masalah-Masalah Sosia* 9, no. 1 (2018): 87.

<sup>35</sup> Suprihatiningsih, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengolahan Limbah Industri Tekstil di Desa Brumbung Mranggen Demak. Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Di Akses tanggal 11 November 2022

kemampuan. Makna kata “pemberian” menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya, kemampuan atau kekuatan adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen pembangunan lainnya.<sup>36</sup>

Dalam mendukung tujuan pemberdayaan ada beberapa strategi dan metode dalam pemberdayaan masyarakat. Strategi yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat menurut Ismawan dalam Mardikanto dan Soebiato adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Pengembangan sumberdaya manusia
- b. Pengembangan kelembagaan kelompok
- c. Pemupukan modal masyarakat (swasta)
- d. Pengembangan usaha produktif
- e. Penyediaan informasi tepat guna

Dalam berbagai situasi dan kondisi, strategi pemberdayaan masyarakat dapat saja dilakukan secara individual, dalam arti menerkaitkan orang lain. dalam konteks pekerjaan sosial ini pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*):

- a. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan secara individu melalui bimbingan konseling, *stress management*, krisis intervensi.tujuan utamanya yakni untuk melatih seseorang untuk dapat menjalani kehidupannya.
- b. Aras Meso. Pemberdayaan yang dilakukan pada kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan serta pelatihan yang biasa digunakan untuk meningkatkan keterampilan, kesadaran serta pengetahuan.
- c. Aras Makro. Pendekatan ini sering disebut dengan pendekatan strategi sistem besar (*large system strategy*). Karena sasarannya diarahkan pada sistem lingkungan yang cukup luas.<sup>38</sup>

Dengan adanya dua strategi pemberdayaan masyarakat diatas dapat disimpulkan

---

<sup>36</sup> Lina Nasuhaton Nafidah, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat,” in *Jurnal Bisns Dan Manajemen Islam*, vol. 3, 2015, 227.

<sup>37</sup> Fatimatul Khoiriyah, Skripsi: *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal*. hal. 89.

<sup>38</sup> MJ Maspaitella dan Nancy Rahakbauwi, “Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendekatan Pekerja Sosial”, *Jurnal Masalah-masalah Sosial* (Vol.5, No.2, 2014), hal. 157–164.

bahwa strategi pemberdayaan masyarakat pada intinya yakni dengan mengembangkan kelompok masyarakat yang didalamnya mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan pengetahuan, serta peningkatan keterampilan agar kelompok masyarakat dapat memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

Untuk mendukung tujuan pemberdayaan masyarakat yang lain, adapun beberapa metode yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan diantaranya :

a. PRA (*Participatory Rural Appraisal*)

*Participatory Rural Appraisal* atau PRA merupakan suatu metode atau pendekatan yang biasa digunakan untuk mempelajari dan menganalisis suatu kondisi kehidupan di desa dengan adanya partisipasi masyarakat desa.<sup>39</sup>

b. RRA (*Rapid Rural Appraisal*)

*Rapid Rrural Appraisal* atau RRA adalah metode kegiatan yang mempelajari tentang pedesaan secara cepat dan intensif untuk memperoleh suatu informasi terbaru dalam waktu yang terbatas dan dilakukan oleh kelompok kecil dengan menggunakan metode, alat dan teknik tertentu.<sup>40</sup>

c. PLA (*Participatory Learning and Action*)

*Participatory Learnig and Action* atau PLA merupakan betuk pendekatan pemberdayaan dengan mengutamakan pada proses belajar bersama yang dapat dilakukan melalui ceramah, diskusi, curah pendapat, dan lain-lain.<sup>41</sup>

d. PAR (*Participatory Action Research*)

*Participatory Action Research* atau yang sering disebut PRA merupakan metode penelitian yang menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam suatu kelompok atau organisasi untuk mendorong suatu perubahan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

1) Sekolah lapangan atau SL (*Farmers Field School /FFC*)

---

<sup>39</sup> Siti Amanah , *Metode PRA dan RRA*, (Bogor: Fakultas Perikanan Institut Pertanian, 2018), hal. 105.

<sup>40</sup> Masykuri Bakri, *Pemberdayaan Masyarakat Pendekatan RRA dan PRA*, (Surabaya: Visipress Media, 2011), hal. 88.

<sup>41</sup> Alin Fatharani Silmi, "Participatory Learning And Action (PLA) di Desa Terpencil: Peran LSM Provinsi Yogyakarta dalam Pemberdayaan Masyarakat di Lubuk Bintialo Sumatra Selatan", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, (Vol.1, No. 1, 2017), hal. 83–102.

Sekolah lapangan (SL) atau *Farmers Field School* (FFC) merupakan kegiatan atau pertemuan yang dilakukan secara berkala dan diikuti oleh beberapa kelompok masyarakat tertentu. Pertemuan diawali dengan masalah yang sedang terjadi, kemudian diikuti dengan tanggapan dari peserta (*audience*), lalu dilanjutkan dengan berbagi pengalaman (*sharing*) dengan melakukan pemecahan - pemecahan masalah yang lebih efektif dan efisien.

2) Dialog

Dialog adalah bentuk komunikasi yang dilakukan secara interpersonal. Dialog sendiri berasal dari bahasa Yunani *dia* dan *legein*. *Dia* yang artinya antara, diantara dan *legein* yang artinya bercakap – cakap, bertukar pikiran dan gagasan.

3) *Focus Group Discussion* (FGD) atau Diskusi Kelompok

Diskusi kelompok yang terarah pada awalnya biasa digunakan sebagai teknik wawancara pada penelitian kualitatif.<sup>42</sup>

Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia di pedesaan, menciptakan peluang usaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:<sup>43</sup>

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah

---

<sup>42</sup>Fatimatul Khoiriyah, Skripsi: *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal*, (Semarang: UIN Walisongo, 2020), hal. 23 – 24.

<sup>43</sup> Totok Mardikanto dan Purwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. 30-32.



punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.
- c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus di cegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*).

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunan sendiri.

Tahapan pemberdayaan Secara hakikat pemberdayaan masyarakat tidak dilakukan secara instan dan cepat, melainkan dilakukan secara bertahap. Adapun tahapan tahapan pemberdayaan menurut Sulistiyani sebagai berikut :

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku untuk menuju perilaku sadar dan peduli sehingga lebih merasa membutuhkan kapasitas diri.
- b. Tahapan transformasi berupa wawasan pengetahuan serta kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat ikut serta dalam pembangunan
- c. Tahap peningkatan intelektual dan kecakapan keterampilan sehingga terbukalah

inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kepada kemandirian.<sup>44</sup>

Masyarakat menurut para ahli, seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith, bahwa sebuah masyarakat dapat terdiri dari berbagai jenis manusia yang berbeda, yang memiliki fungsi yang berbeda, yang terbentuk dan dilihat hanya dari segi fungsi bukan dari rasa suka maupun cinta dan sejenisnya, dan hanya rasa untuk saling menjaga agar tidak saling menyakiti.

Masyarakat menurut Linton adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat terbentuk organisasi yang mengatur setiap individu dalam masyarakat tersebut dan membuat setiap individu dalam masyarakat dapat mengatur diri sendiri dan berfikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan dengan batasan tertentu.

Menurut Ony dan Pranarka menyebutkan bahwa konsep pemberdayaan pada awalnya merupakan gagasan yang menempatkan manusia sebagai subyek di dunianya, karena itu wajar apabila konsep ini merupakan kecenderungan ganda, yaitu:

a) Kecenderungan primer,

pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya.

b) Kecenderungan skunder,

menekankan pada proses menstimulasi mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Ahli dari Indonesia, yaitu Selo Soemardjan memberikan pengertian masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.<sup>45</sup>

Berdasarkan pengertian masyarakat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa masyarakat adalah sekelompok individu yang memiliki

---

<sup>44</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model – Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta : Gava Media, 2004), hal. 83.

<sup>45</sup> I Gede Dana Yasa and dan Gede Sandiasa2, “Implementasi Kebijakan Desa Pakraman Dalam Pemberdayaan Masyarakat,” *Locus Majalah Ilmiah* 9, no. 1 (n.d.): 2018.

kepentingan bersama dan memiliki budaya serta lembaga yang khas. Masyarakat juga bias dipahami sebagai sekelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama.

Karakteristik masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) Aglomerasi dari unit biologis dimana setiap anggota dapat melakukan reproduksi dan beraktivitas.
- b) Memiliki wilayah tertentu.
- c) Memiliki cara untuk berkomunikasi.
- d) Terjadinya diskriminasi antara warga masyarakat dan bukan warga masyarakat.
- e) Secara kolektif menghadapi ataupun menghindari musuh.

Dengan demikian, ada solidaritas di antara warga dan kelompok manusia tersebut. Kelompok manusia tersebut merupakan sebuah kehidupan bersama. Maksudnya, mereka memiliki budaya bersama yang membuat anggota saling terkait satu sama lain.

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan efektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kemandirian masyarakat dapat di capai tentu memerlukan sebuah proses belajar. Masyarakat yang mengikuti proses belajar yang baik, secara bertahap akan memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri. Berkaitan dengan hal ini, Sumodiningrat (2000) menjelaskan bahwa keberdayaan masyarakat yang ditandai adanya kemandiriannya dapat dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat.

Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk

memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya.<sup>46</sup>

Adapun proses terbentuknya masyarakat, masyarakat terbentuk melalui proses tertentu yang dilaluinya. Dalam mempelajari proses terbentuknya masyarakat, perlu dilakukan analisis dari berbagai proses yang ada seperti belajar kebudayaan sendiri, proses evaluasi social, proses difusi, akulturasi, dan pembaruan serta inovasi.

Pemberdayaan Masyarakat, ialah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan Masyarakat hanya bias terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi.

Adapun Prinsip pemberdayaan adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk dibahas dalam proses pemberdayaan masyarakat terkait dengan persoalan kebijakan sebagai pedoman yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh dan utuh sehingga sasaran yang ingin di capai terutama memberdayakan masyarakat yang rentan kemiskinan dapat terealisasi. Terdapat empat prinsip yang sering digunakan dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat. Prinsip dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

a. Prinsip kesetaraan

Dalam proses pemberdayaan prinsip utama yang harus dipegang yakni dengan adanya kesetaraan antar masyarakat dengan lembaga.

b. Partisipasi

Keberhasilan dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang mampu memandirikan masyarakat yakni bersifat partisipatif, direncanakan, dilaksanakan diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri. Tetapi perlu adanya waktu dan proses pendampingan yang memerlukan pendamping yang menguasai pemberdayaan masyarakat tersebut.

c. Keswadaan dan kemandirian

Prinsip keswadaan yakni tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak punya kemampuan, akan tetapi sebagai subjek yang memiliki sedikit kemampuan yang belum dikembangkan, yang kemudian akan dikembangkan melalui sebuah

---

<sup>46</sup> Kesi Widjajanti, "Model PPemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 12 (2011): 16.

pemberdayaan.

d. Berkelanjutan

Ketika melaksanakan program pemberdayaan perlu adanya rancangan keberlanjutan. Karena pada dasarnya peran seorang pendamping dalam pemberdayaan masyarakat sangat dominan dibandingkan dengan masyarakat sendiri. Akan tetapi pada akhirnya pendamping tidak diperlukan karena masyarakat yang didampingi sudah mampu berkembang hingga mengelola kegiatan sendiri.<sup>47</sup>

Dalam rangka mengemban tugas dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Badan pemberdayaan menetapkan visi-misi strategi dan program pemberdayaan masyarakat yaitu : Visi Pemberdayaan Masyarakat adalah meningkatkan masyarakat dan, misi Misi Pemberdayaan Masyarakat adalah mengembangkan kemampuan dan kemandirian dan secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Kemandirian dalam konsep pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah tingkat kemajuan yang harus dicapai sehingga masyarakat dapat membangun dan memelihara kelangsungan hidupnya berdasarkan kekuatannya sendiri secara berkelanjutan. Artinya untuk membangun bangsa yang mandiri dibutuhkan perekonomian yang mapan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Sri Najati, Agus Asman, dan I Nyoman N. Suryadiputra, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, (Bogor : Wetland Internasional – IP, 2005), hal. 54 – 59.

<sup>48</sup> Munawar Noor, “Pemberdayaan Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah CIVIS* 1, no. 2 (2011): 90–91.

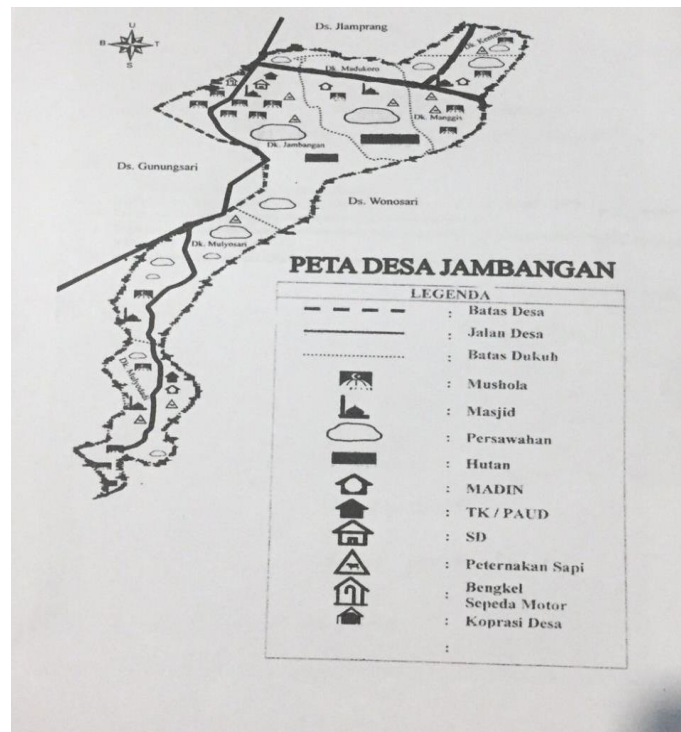
**BAB III**  
**IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMEBRDAYAAN**  
**MASYARAKAT DESA JAMBANGAN KECAMATAN BAWANG KABUPATEN**  
**BATANG**

**A. Gambaran Umum Desa Jambangan**

**1. Kondisi Geografis dan Batas Wilayah**

Desa jambangan merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Bawang Kabupaten Batang. Desa jambangan sendiri berada di ketinggian dari permukaan laut 960 m dari permukaan air laut, termasuk ataran tinggi dan suhu rata-rata antara 18-30°C, dengan curah hujan sebanyak 1.500 mm/tahun. Dilihat dari segi aksetabilitas, desa jambangan cukup mudah untuk dijangkau karena melawati jlan yang utama yang diakses untuk menuju ke desa-desa yang masih berada jauh dari pusat daerah di kecamatan Bawang kabupaten Batang. (profil desa Jambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Batang 2022).

**Gambar 1.1 Peta Desa Jambangan**



*Sumber : Dokumentasi peta Desa Jambangan 2022*

Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwasannya desa Jambangan memiliki luas wilayah ± 689,534 ha, dan memiliki batas wilayah

- a) Sebelah selatan : Desa kebaturan kec. Bawang
- b) Sebelah utara : Desa Jlamprang kec. Bawang
- c) Sebelah barat : Desa Gunungsari kec. Bawang
- d) Sebelah timur : Desa Wonosari kec. Bawang

Jarak dari pusat pemerintah

- a) Jarak dari pusat pemerintahan ke kecamatan : 3 km.
- b) Jarak dari ibu kota kabupaten Batang : 51 km.
- c) Jarak dari ibu kota provinsi Jawa Tengah : 107 km.

## 2. Kondisi Demografis

Berdasarkan dari data yang diperoleh, desa jambangan kecamatan bawang terbagi menjadi 17 RT dan 3 RW. Dari data yang diperoleh desa Jambangan memiliki jumlah penduduk sejumlah 3.510 jiwa dan terbagi menjadi 1.790 laki-laki dan 1.720 perempuan dengan perincian.

**Tabel 2.1**

**Jumlah penduduk desa jambangan berdasarkan jenis kelamin**

Laki-laki	1.790 orang
Perempuan	1.720 orang
Jumlah	3.510 orang

*Sumber ; Data Demografis Desa Jambangan 2022*

Dari table 2.1 sudah dapat dilihat bahwa jumlah penduduk desa jambangan kecamatan bawang kabupaten batang berjumlah 3.510 orang jiwa, yang mana dari keseluruhan jumlah tersebut terdapat 1.790 orang laki-laki dan 1.720 orang perempuan.

Dari data tersebut sudah terlihat jelas bahwasannya jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perempuan yang berada di desa jambangan kecamatan bawang kabupaten batang tersebut.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah penduduk desa jambangan menurut usia**

<b>0-4</b>	<b>5-9</b>	<b>10-14</b>	<b>15-19</b>	<b>20-24</b>	<b>25-29</b>
Laki-laki : 90	Laki-laki : 107	Laki-laki : 136	Laki-laki : 159	Laki-laki : 123	Laki-laki : 155
Perempuan : 96	Perempuan : 104	Perempuan : 119	Perempuan : 156	Perempuan : 115	Perempuan : 140
Laki-laki + perempuan = 186	Laki-laki + perempuan = 211	Laki-laki + perempuan = 255	Laki-laki + perempuan = 305	Laki-laki + perempuan = 238	Laki-laki + perempuan = 295
<b>30-34</b>	<b>35-39</b>	<b>40-44</b>	<b>45-49</b>	<b>50-54</b>	<b>55-59</b>
Laki-laki : 130	Laki-laki : 160	Laki-laki : 153	Laki-laki : 100	Laki-laki : 140	Laki-laki : 93
Perempuan : 136	Perempuan : 141	Perempuan : 131	Perempuan : 129	Perempuan : 116	Perempuan : 107
Laki-laki + perempuan = 266	Laki-laki + perempuan = 201	Laki-laki + perempuan = 286	Laki-laki + perempuan = 229	Laki-laki + perempuan = 256	Laki-laki + perempuan = 200

*Sumber ; Data Demografis Desa Jambangan 2022*

Dari table 2.1 diatas dapat dilihat bahwa penduduk desa jambangan menurut usia berjumlah 2.900 jiwa, sedangkan jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki – laki yaitu laki- laki berjumlah 1.410 jiwa dan perempuan berjumlah 1.490. dengan demikina kita dapat melihat bahwa jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki- laki yang ada di desa jambangan kecamatan bawang kabupaten batang.



Tabel 2.3

## Jumlah penduduk desa jambangan menurut tingkat pendidikan

Tidak/belum sekolah	Belum tamat SD/ sederajat	Tamat SD/ sederajat	SLTP/ sederajat
Laki-laki : 320	Laki-laki : 190	Laki-laki : 1. 065	Laki-laki : 138
Perempuan : 307	Perempuan : 160	Perempuan : 1. 098	Perempuan : 110
Laki-laki + perempuan = 627	Laki-laki + perempuan = 350	Laki-laki + perempuan = 2. 163	Laki-laki + perempuan = 248

SLTA/ Sederajat	Diploma I/II	Akademi/ Diploma III/ S. Muda	Diploma IV/ Strata I
Laki-laki : 56	Laki-laki : 2	Laki-laki :	Laki-laki : 19
Perempuan : 33	Perempuan :	Perempuan :	Perempuan : 12
Laki-laki + perempuan = 89	Laki-laki + perempuan = 2	Laki-laki + perempuan =	Laki-laki + perempuan = 31

Strata II	Strata III	Jumlah
Laki-laki :	Laki-laki :	Laki-laki : 1. 790
Perempuan :	Perempuan :	Perempuan : 1. 720
Laki-laki + perempuan =	Laki-laki + perempuan =	Laki-laki + perempuan = 3.510

*Sumber ; Data Demografis Desa Jambangan 2022*

Dari tabel 2.3 jumlah penduduk desa Jambangan kecamatan Bawang kabupaten Batang menurut tingkat pendidikan yaitu dapat dilihat bahwasannya laki-laki 56 dan perempuan 33 yang bersekolah SLTA/Sederajat, laki-laki 190 dan perempuan 160 yang bersekolah SD/Sederajat, laki-laki 138 dan perempuan 110 yang bersekolah SLTP/Sederajat, laki-laki 2 yang menjalankan pendidikan Diploma I/II, laki-laki 19 dan perempuan 12 yang menjalankan pendidikan Diploma IV/Strata I.

### 3. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat desa jambangan kecamatan Bawang kabupaten Batang masuk dalam kategori menengah kebawah. Yang mana dapat dilihat dari mata pencarian masyarakat itu sendiri sebagian besar sebagai petani.

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No.	Pekerjaan	Lk	Pr	Jumlah
1.	Belum/Tidak bekerja	339,	324,	663,
2.	Mengurus Rumah Tangga	0,	194,	194,
3.	Pelajar/Mahasiswa	219,	177,	393,
4.	Pensiunan	1,	1,	2,
5.	PNS	2,	3,	5,
6.	Tentara Nasional Indonesia	1,		1,
7.	Pedagang	9,	5,	14,
8.	Petani	706,	733,	1.439,
9.	Nelayan	1,		1,
10.	Transportasi	2,		2,
11.	Karyawan swasta	2,	2,	4,
12.	Karyawan Honorer	1,	1,	2,
13.	Buruh Harian Lepas	28,	9,	37,
14.	Buruh Tani/Perkebunan	21,	19,	40,
15.	Tukang Batu	1,		1,
16.	Tukang Kayu	6,		6,
17.	Guru	6,	3,	9,
18.	Sopir	13,		13,
19.	Pedagang	5,	6,	11,
20.	Perangkat Desa	1,	10,	11,
21.	Kepala Desa		1,	1,
22.	Wiraswasta	423,	225,	649,

*Sumber ; Data Demografis Desa Jambangan 2022*

Dari tabel 3.1 diatas dapat kita lihat hasil mata pencaharian penduduk desa Jambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Batang ini mayoritas penduduk sebagai petani yang mana jumlahnya yaitu 1.439, sedangkan jumlah pensiunan 1, PNS (Pegawai Negeri Sipil) 2, TNI (Tentara Nasional Indonesia) 1, pedagang 9, nelayan 1, karyawan swasta 2, karyawan honorer 2, buruh harian lepas 37, tukang batu 1, tukang kayu 6, guru 9, sopir 13, pedagang 11, perangkat desa 11, kepala desa 1, wiraswasta 649. Dengan demikian dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk desa Jambangan kecamatan Bawang kabupaten Batang sebagian besar sebagai petani.

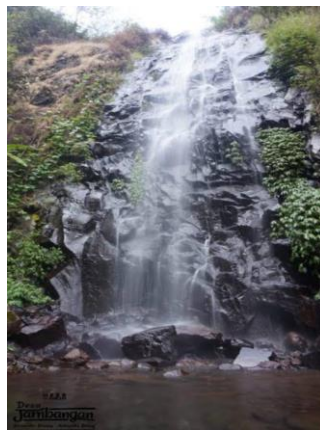
#### 4. Kondisi Potensi desa Jambangan

Desa Jambangan kecamatan Bawang kabupaten Batang ini memiliki beberapa potensi unggulan yang dihasilkan oleh desa yaitu seperti Potensi Pariwisata

Di desa jambangan terdapat potensi wisata desa yaitu curug sipitung yang letaknya mana jalan menuju curug tersebut dapat dibilang masi cukup sulit karena belum beraspal sehingga cukup curam yang mana disampingnya terdapat jurang yang cukup dalam.

**Gambar 2.1**

#### **Curug Sipitung desa Jambangan**



*Sumber : Dokumentasi Desa Jambangan*

Dilihat dari gambar 2.1 ini curug sipitung yang terletak di desa Jambangan ini menjadi salah satu wisata yang dimanfaatkan oleh desa menjadi salah satu potensi wilayah sebagai destinasi wisata air terjun yang mempunyai ketinggian  $\pm$  35 Meter, yang

mana tebing dari curug sipitung ini juga dijadikan sebagai wahana panjat tebing. Selain itu juga.

#### 4. Sumber Daya desa Jambangan

dari data yang sudah didapatkan secara langsung bahwa desa Jambangan kecamatan Bawang kabupaten Batang ini memiliki luas lahan sekitar , dan terbagi menjadi beberapa lahan pertanian seperti tanaman padi, tanaman ketela pohon, tanaman ketela rambat , tanaman sayuran , tanaman jagung , tanaman polowij.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah penggunaan lahan desa Jambangan**

<b>Penggunaan lahan</b>	<b>Luas (Ha)</b>
Tanaman padi	50,2 ha.
Tanaman ketela pohon	40,2 ha.
Tanaman ketela rambat	4 ha.
Tanaman sayuran	20 ha.
Tanaman jagung	1 ha.
Tanaman polowijo	1 ha.
<b>Total</b>	116,2 ha

*Sumber : Data monografi desa Jambangan 2022*

Dari tabel 4.1 diatas dapat kita lihat dengan jelas bahwa penggunaan lahan di desa Jambangan terbagi menjadi 6 (enam) lahan yaitu, lahan tanaman padi seluas 50,2 ha, lahan tanaman ketela pohon seluas 40,2 ha, lahan tanaman ketela rambat seluas 4 ha, lahan tanaman sayuran seluas 20 ha, lahan tanaman jagung seluas 1 ha, dan lahan tanaman polowijo selua 1 ha. Dapat dilihat juga bahwa penggunaan lahan di dominasi oleh tanaman padi dengan luas 50,2 dikarenakan penduduk desa Jambangan mayoritas mata pencaharian sebagai petani

#### 5. Sosial budaya

Sosal budaya yang sampai saat ini masi melekat di desa jmabangna kecamatan bawang kabupaten batang yaitu salah satunya gotong royong yang sangat dijunjung

tinggi oleh masyarakat desa jambangan tanpa membedakan status sosial.

**Gambar 2.2**  
**Gotong royong di desa Jambangan**



*Sumber : Dokumentasi Desa Jambangan*

Dapat dilihat dari gambar 2.2 bahwasannya kegiatan gotong yang dilakukan oleh masyarakat desa jambangan yaitu pembuatan jalan air sungai menuju persawahan yang dimiliki oleh warga desa jambangan. Supaya tanaman padi yang di tanam oleh para petani masyarakat desa jambangan dapat tumbuh dengan bagus.

## 6. Kondisi keagamaan

Dari data yang diperoleh langsung dari lapangan bahwasannya desa jambangan kecamatan bawang ini mayoritas penduduknya beragama islam namun ada beberapa penduduk yang beragama non islam. Namun, meskipun demikian toleransi antar warga desa sangatlah tinggi dan tidak membedakan satu sama lain yang mana dari dua beragama tersebut saling menghormati kegiatan keagamaan dari masing-masing tersebut.

**Tabel 5.1**  
**Jumlah penduduk desa Jambangan dalam beragama**

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	3.487
2.	Non Islam	23

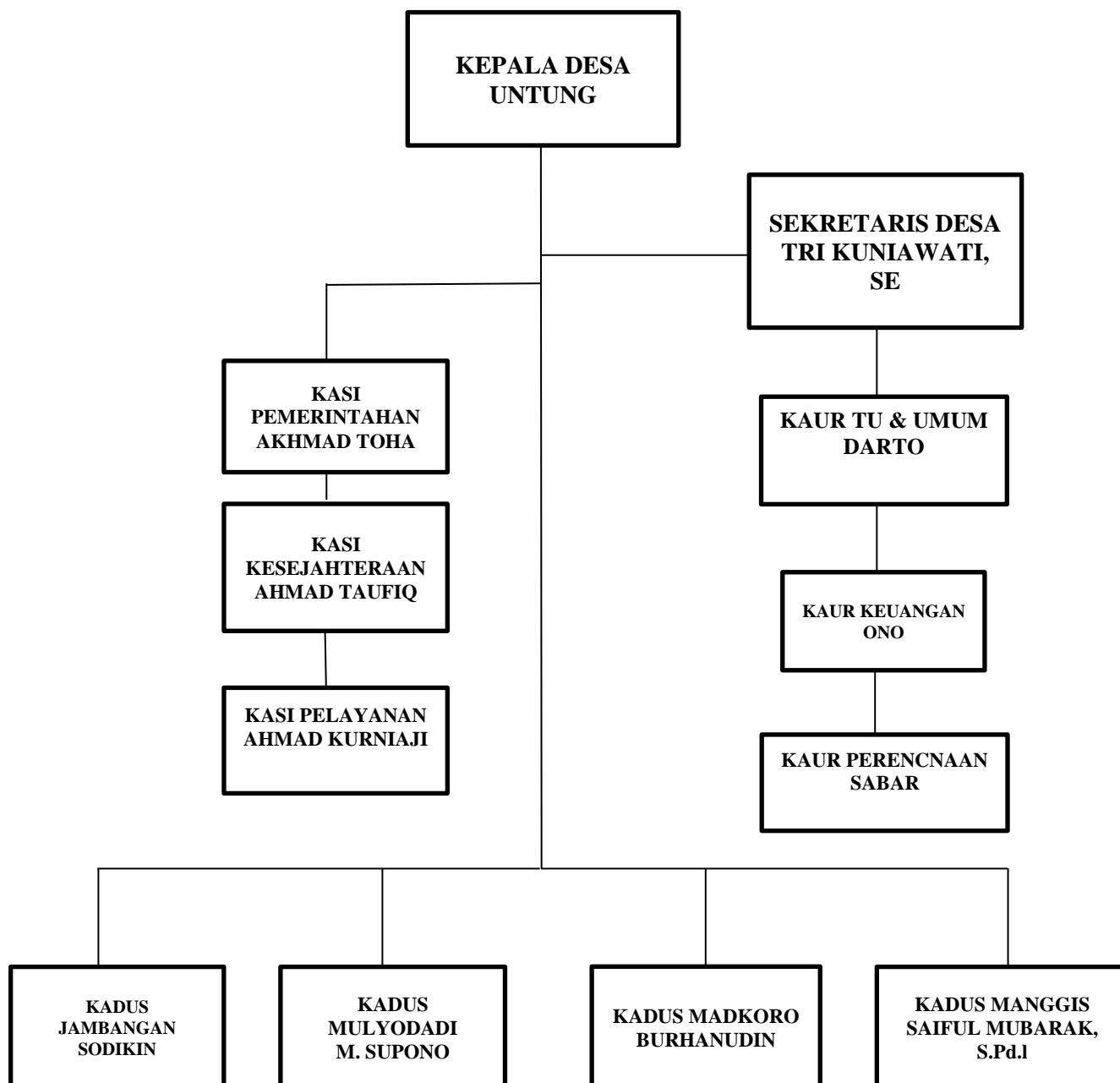
	Jumlah	3.510
--	--------	-------

*Sumber : data monografi desa Jambangan*

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa mayoritas penduduk desa jambangan yang berjumlah 3.510 yaitu beragama islam 3.487 dan non islam 23, dan dapat dilihat bahwasannya penduduk beragama non islam lebih sedikit dari jumlah penduduk desa jambangan yang beragama islam.

**7. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Jambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Batang.**

**Bagan struktur organisasi pemerintahan desa Jambangan**



Adapun tugas dan wewenang kepala desa :

## a) Kepala desa

- 1) Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
- 2) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut :
- 4) Menyenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penetapan dan pengelolaan wilayah.
- 5) Melaksanakan pembangunan, seperti pembanguan sarana dan prasarana pedesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, dan juga kesehatan.
- 6) Pembinaan kemasyrakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewjiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 7) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna.
- 8) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

## b) Sekretaris desa

- 1) Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris desa
- 2) Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris desa mempunyai fungsisebagai berikut :
- 4) Melaksanakan urusan ketatusahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, asrip, dan ekspedisi
- 5) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyedian prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum



- 6) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga pemerintahan desa lainnya
  - 7) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan
- c) Kaur keuangan
- 1) Kaur keuangan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat
  - 2) Kaur keuangan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa
  - 3) Melaksanakan tugas sebagaimana, kaur keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
    - (a) Pengurusan administrasi keuangan desa
    - (b) Pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran desa
    - (c) Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan desa
    - (d) Melaksanakan administrasi penghasilan kepala desa
    - (e) Melaksanakan administrasi penghasilan perangkat desa
    - (f) Melaksanakan administrasi penghasilan BPD
    - (g) Melaksanakan administrasi penghasilan lembaga pemerintahan desa lainnya, dan
    - (h) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
- d) Kaur perencanaan
- 1) Kaur perencanaan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah
  - 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, kaur perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
    - (a) Mengkoordinasikan urusan perencanaan desa
    - (b) Menyusun RAPBDes
    - (c) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan desa
    - (d) Melakukan monitoring dan evaluasi program pemerintahan desa

- (e) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDes)
  - (f) Menyusun laporan kegiatan desa, dan
  - (g) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
- e) Kasi pemerintahan
- 1) Kasi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis bidang pemerintahan
  - 2) Kasi pemerintahan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan
  - 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, kasi pemerintahan mempunyai fungsi :
    - (a) Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan desa
    - (b) Menyusun rencana regulasi pertanahan
    - (c) Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
    - (d) Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat desa
    - (e) Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan
    - (f) Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah desa
    - (g) Melaksanakan pendataan dan pengelolaan profil desa, dan
    - (h) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
- f) Kasi kesejahteraan
- 1) Kasi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang kesejahteraan
  - 2) Bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan
  - 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kasi kesejahteraan mempunyai fungsi :
    - (a) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan
    - (b) Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan
    - (c) Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan
    - (d) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya

- (e) Melaksanakan tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang ekonomi
- (f) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik
- (g) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup
- (h) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat
- (i) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olah raga, dan karang taruna
- (j) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang dinerikan oleh atasan

g) Kasi pelayanan

- 1) Kasi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang pelayanan
- 2) Kasi pelayanan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, kasi pelayanan mempunyai fungsi :
  - (a) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa
  - (b) Meningkatkan upaya pelaksanaan masyarakat desa
  - (c) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat desa
  - (d) Melaksanakan pelestarian nilai sosail budaya, keagamaan, dan kesejahteraan masyarakat desa
  - (e) Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk
  - (f) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan

h) Kadus (Kepala Dusun)

- 1) Kadus berkedudukan sebagai unsur satuan tugas keilayaan
- 2) Kadus bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas di wilayah dusun, meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemeberdayaan masyarakat desa
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, kadus memiliki fungsi :

- (a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah
- (b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya
- (c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya
- (d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- (e) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan

## **8. Gambaran Umum Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi dana desa (ADD) yaitu dana yang bersumberkan dari APBN yang kemudian diransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk diberikan kepada desa. Dari situ dana desa dialokasikan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa yang dipertanggung jawabkan oleh kepala desa setempat.

Alokasi dana desa sendiri dapat dikatakan sebagai bantuan yang mana dapat dijadikan sebagai pendorong dalam membiayai program kegiatan pemerintah desa dalam pemberdayaan mapaupun pembangunan desa. Tujuan dari adanya Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu mengadakan atau membuat perencanaan yang mana dan bersumber dari Alokasi Dana Desa tersebut, seperti untuk meanggulangi kemiskinan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, membantu meningkatkan kegiatan masyarakat dalam hal kegiatan sosial budaya maupun ekonomi masyarakat, meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat, meningkatkan penghasilan dari badan usaha milih desa (BUMDes), dan memberikan penghasilan bagi warga desa yang menganggur melalui kegiatan ekonomi yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut. Adapun anggaran dana desa di desa jambanagan kecamatan bawang kabupaten batang di tahun 2022 ini sebesar Rp. 8.938.709.000 ,- yang mana sumber dana ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dijelaskan diatas.

Maksud dan tujuan (ADD) yaitu untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembanguana serta pemebrdayaan masyarakat.

## **B. Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Jambanagn Kecamatan Bawang Kabupaten Batang.**

Dilihat dari kebijakan pemerintah terkait Alokasi Dana Desa (ADD) tidak lepas dari peran pemerintah dalam melaksanakan kegiatan atau aktifitas-aktifitas pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut. Yang mana pemerintah desa itu sendiri yang menjadi jembatan terhadap masyarakat desa untuk membantu kepentingan masyarakat secara umum. Kegiatan ataupun aktifitas-aktifitas yang di berikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat diharapkan dapat membantu masyarakat dalam hal perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat.

Dari adanya alokasi dana desa (ADD) ini sangatlah penting untuk suatu kesejahteraan masyarakat baik dalam pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat yang mana disitu melibatkan adanya masyarakat. Sudah diketahui bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) di desa jambangan yang mana sebagian dari itu di alokasikan untuk pemberdayaan masyarakat yang diharpkan masyarakat desa jambanagn ini semangat dan iut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh desa.

Adapun beberapa program kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sudah atau belum terealisasikan, yaitu :

**Tabel 6.1**

**Data program kegiatan pemberdayaan desa Jambangan**

<b>No</b>	<b>Nama kegiatan</b>	<b>Sudah/Belum Terealisasikan</b>
<b>1.</b>	Kegiatan Ibu-Ibu PKK	Sudah terealisasikan
<b>2.</b>	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Sudah terealisasikan
<b>3.</b>	Pemberdayaan di bidang olahraga	Sudah terealn
<b>4.</b>	Kegiatan Karang Taruna	Sudah terealisasikan

*Sumber : Data dokumentasi desa jambangan*

Dari tabel 6.1 diatas dapat dilihat kegiatan pemebrdayaan masyarakat yang terealisasikan dengan cukup baik seperti kegiatan ibu-ibu PKK, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemberdayaan di bidang olahraga, dan kegiatan karang taruna. Adapun penjelasan kegiatannya sebagai berikut :

### 1. Kegiatan Ibu-Ibu PKK

Kegiatan ibu-ibu PKK di desa jambangan merupakan salah satu program kegiatan yang didukung oleh desa sendiri yang mana kegiatnnya sudah terealisasikan seperti, pengajian rutin yang diadakan setiap seminggu sekali oleh kelompok PKK, penyuluhan-penyuluhan yang diberikan untuk kegiatan PKK dalam bidang kesehatan dan juga dalam bidang keterampilan. Selain dari kegiatan kegiatan yang sudah disebutkan tadi da juga kegiatan-kegiatan lain seperti lomba-lomba memasak dan senam antar desa se-kecamatan.

**Gambar 3.1**

#### **Kegiatan Ibu-Ibu PKK desa Jambangan**



*Sumber : dokumentasi desa Jambangan*

Adapun hasil observasi dan wawancara kepada ibu-ibu PKK desa jambangan.

*“Dari adanya PPK yang banyak mengadakan kegiatan rutin seperti pengajian*

*ibu-ibu setiap satu minggu sekali, ibu PKK juga sangat antusias apabila ada kegiatan penyuluhan baik itu penyuluhan kesehatan dan juga kegiatan keterampilan yang dilakukan oleh ibu-ibu seperti pembuatan kerajinan dari bahan-bahan bekas yang masih layak untuk di jadikan karya yang mana dari karya itu dapat dimanfaatkan".* (hasil wawancara dengan ibu tri selaku anggota ibu-ibu PKK desa jambangan bawang. 18 Agustus 2022).

## **2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Dari adanya badan usaha milik desa (BUMDes) di desa jambangan ini yang mana dana nya bersumber dari alokasi dana desa yang diprogramkan oleh desa jambangan. Dari adanya badan usaha milik desa ini bertujuan agar desa memiliki usaha mandiri dan bisa dikelola langsung oleh masyarakat desa jambangan untuk dijadikan sumber mata pencaharian bagi masyarakat desa jambangan yang membutuhkan dan juga agar dapat mensejahterakan masyarakat desa jambangan dan dapat memberikan pemasukan kepada desa apabila kegiatan sudah berjalan dengan lancar. Adapun potensi desa yang dijadikan sebagai badan usaha desa dengan memanfaatkan potensi desa yaitu perkebunan jagung. Hasil wawancara yang didapatkan dari observasi. Berikut hasil wawancara :

*"dari yang dilihat yaitu potensi desa yang sudah ada sejak dulu yaitu potensi perkebunan jagung di desa jambangan. Dari adanya potensi perkebunan jagung ini dilihat dapat menghasilkan dan, dari situ maka olahan jagung yang sudah dipanen dijadikan sebagai nasi jagung yang mana dilihat bahwasannya nasi jagung banyak di minati oleh masyarakat desa dikarenakan harganya sangat terjangkau. Oleh karena itu hasil panen jagung diproduksi menjadi nasi jagung dan dijadikan badan usaha milik desa (BUMDes) jambangan".* (Wawancara dengan bapak taufik yang juga ikut mengurus BUMDes, pada tanggal 18 Agustus 2022)

Tetapi, sampai saat ini ketika peneliti melakukan penelitian badan usaha milik desa (BUMDes) ini masih belum terealisasikan. Menurut bapak untung selaku kepala desa jambangan sendiri kegiatan ini diberhentikan semenjak adanya covid 19. Terlebih lagi belum ada ide lebih lanjut yang bisa dijadikan usaha kembali.

### 3. Pemberdayaan di bidang olahraga

Bidang pemberdayaan ini adalah salah satu bidang yang dapat dibilang banyak disukai oleh masyarakat desa jambangan khususnya kaum muda, karena desa jambangan mempunyai beberapa cabang olah raga didalamnya seperti cabang sepak bola, cabang bola voli, cabang bulu tangkis, cabang pingpong, dan cabang sepak takrow. Adapun cabang olah raga yang sering di ikut sertakan dalam perlombaan antar desa se-kecamatan yaitu cabang olah raga sepak bola yang mana lebih banyak diminati oleh warga masyarakat desa jambangan sendiri. Hasil wawancara yang didapatkan dari observasi. Berikut hasil wawancara

*“dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang olah raga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat desa jambangan dan juga partisipasi masyarakat juga dalam mengikuti kegiatan yang sudah direncanakan oleh pemerintah desa jambangan”*. (wawancara dengan bapak untuk selaku kepala desa jambangan bawang. 18 Agustus 2022).

### 4. Kegiatan Karang Taruna

Kegiatan karang taruna adalah suatu keorganisasi kepemudaan yang dibentuk oleh masyarakat desa sebagai wadah untuk para generasi muda dalam mengembangkan diri atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Kegiatan yang di lakukan oleh karang taruna biasanya seperti kegiatan keagamaan, keterampilan dan kesenian yang mana dijalankan oleh para pemuda desa. Adapun hasil observasi dan wawancara. Berikut hasil wawancara

*“dikarenakan di desa jambanagn baru saja melakukan pemilihan kepala desa maka dari itu kegiatan karang taruna belum bisa berjalan seperti sebelumnya, namun kegiatan karang taruna sendiri diperiode sebelumnya berjalan cukup baik dan lancer karena pemuda-pemuda desa ini cukup antusisa terhadap organisasi yang mewadahi remaja desa, maka dati ini kegiatan karang taruna pada periode baru ini belum terlaksana”*. (wawancara dengan bapak untung selaku kepala desa jambangan bawang. 18 Agustus 2022).

Berbicara mengenai bagaimana pengimplementasian Alokasi Dana Desa (ADD),



yang dilakukan oleh pemerintah desa Jambangan dalam menjalankan program yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), maka dari itu hal tersebut tidak terlepas dari tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan program terkhusus dalam memberdayakan masyarakat melalui dana desa. Menurut sekretaris desa Jambangan yaitu Ibu Tri Kurniawati mengatakan bahwasannya tahapan atau proses pengimplementasian Alokasi Dana Desa melalui program-program desa, yang mana melalui beberapa tahapan-tahapan, yaitu ;

Tahapan pertama, pemerintah desa Jambangan mengadakan musyawarah desa (MUSDES) . MUSDES juga dihadiri oleh tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemerintah desa. Bertujuan untuk menampung aspirasi dari masyarakat desa dan program apa saja yang sekiranya akan terlaksana dan dapat direalisasikan oleh pemerintah desa nantinya diwaktu kepala desa sudah ditetapkan atau terpilih dan dilantik.

Setelah itu kepala desa menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) kemudian dilanjut dengan penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) dan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes).

Yang kedua, setelah melaksanakan musyawarah dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemerintah desa. Kemudian pemerintah desa akan menjadikan prioritas dari salah satu kegiatan-kegiatan atau program-program yang telah direncanakan. Setelah salah satu program yang sudah dijadikan prioritas maka akan dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKPDes). Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dilakukan kegiatan yang mana menggunakan tenaga kerja sendiri atau swakelola yang mana menggunakan tenaga kerja dari masyarakat itu sendiri supaya uang yang digunakan dalam pembangunan tidak keluar desa dan dapat membantu masyarakat desa agar mendapatkan penghasilan dari kegiatan ini terkhusus bagi warga desa yang pengangguran. Sehingga perputaran uang tersebut berlangsung di desa saja.

Dari program swakelola tersebut, sesuai dengan strategi pemberdayaan masyarakat. Menurut Suharto, penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu

: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut:

**a) Pemungkinan**

Dari beberapa upaya seperti menciptakan beberapa lapangan pekerjaan bagi masyarakat baik dari pembangunan maupun wisata dan juga melalui pelatihan-pelatihan. Pemberdayaan mampu membebaskan masyarakat dari struktur struktural dan kultural yang menghambat.

**b) Penguatan**

Memperkuat pengetahuan dan juga kemampuan dengan melakukan pembekalan pelatihan-pelatihan. Adapun dalam aspirasi masyarakat bisa dimusyawarahkan dan dimufakatkan dalam tahap perumusan program desa.

**c) Perlindungan**

Melindungi masyarakat yang lemah dari masyarakat yang kuat. Dalam pelaksanaannya pemerintah dalam memberdayakan tentunya lebih mengutamakan bagi orang yang lemah disini berarti orang yang lebih membutuhkan. Melalui system swakelola, pemerintah desa emnyaring masyarakat yang akan diberdayakan seperti masyarakat yang masih menganggur, dan warga yang menyandang disabilitas.

**d) Penyokongan**

Memberikan bimbingan dan juga dukungan agar masyarakat desa mampu mengembangkan kemampuan dan juga potensi mereka. Dengan adanya bantuan dana desa dapat memberikan manfaat berupa pelatihan kepada masyarakat, dan tentunya dapat merasakan manfaat terhadap semua lapisan masyarakat.

**e) Pemeliharaan**

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang

memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

#### **ANALISIS IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMEBRDAYAAN MASYARAKAT DESA JAMBANAGN KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG**

##### **A. Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Jambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Batang**

Dalam buku Ir. Hendrawati Hamid, M.Si., definisi pemberdayaan maupun pemberdayaan masyarakat telah cukup lama kita kenal, sirining dengan makin meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Yang tidak hanya menimpa masyarakat di pedesaan maupun di perkotaan. Dapat diartikan pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari. Memberikan power kepada yang kurang mampu atau miskin memang merupakan tanggung jawab pemerintah, namun seharusnya mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama masyarakat itu sendiri yang menjadi kelompok sasaran yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan setiap program atau kegiatan pemberdayaan.<sup>49</sup>

Menurut Suhartini, Pemberdayaan masyarakat dapat memberikan akses kepada masyarakat, lembaga dan organisasi masyarakat dengan memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya, karena penyebab ketidakberdayaan masyarakat disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan ketrampilan serta adanya kondisi kemiskinan yang dialami oleh sebagian masyarakat.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> M.Si. Ir. Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (Makassar, 2018). hlm. 9.

<sup>50</sup> Rauf Hatu, "Pemberdayaan Dan Pendampingan Sosial Dalam Masyarakat," *Jurnal Inovasi*. vol 7, no. 4 (2010): 241.

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan secara langsung baik itu melalui wawancara, observasi, maupun dari dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti terkait implementasi alokasi dana desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat desa jambangan kecamatan bawang kabupaten batang. Pemberdayaan masyarakat itu sendiri dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang mana masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD).

Dalam pelaksanaan ADD di desa, diawali dengan kegiatan musyawarah perencanaan, seperti halnya desa-desa yang lainnya, pada desa jambangan pelaksanaan ADD diawali dengan musyawarah desa, sosialisasi dan perencanaan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan Pembina ADD dari kecamatan. Perencanaan Alokasi Dana Desa di desa Jambangan kerap menggunakan perencanaan yang partisipatif.

Implementasi dari Alokasi Dana Desa (ADD) di desa jambangan kecamatan bawang kabupaten batang dalam mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa jambangan sudah cukup baik dengan mengacu pada program pemberdayaan masyarakat. Tujuannya agar untuk mensejahterakan masyarakat desa agar membantu dalam mendukung kelanjutan kegiatan masyarakat desa jambangan. wawancara dengan bapak untung selaku kepala desa jambangan.

*“implementasi/pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) pada desa jambangan sudah sesuai dengan yang ditetapkan dan berjalan dengan cukup baik, namun terdapat beberapa kendala yang sebabkan karena terlambatnya pembuatan laporan terkait anggaran dana tersebut. Sehingga mengakibatkan alokasi dana desa tidak terealisasi dengan tepat waktu”.* (wawancara dengan bapak untung selaku kepala desa jambangan pada 18 Agustus 2022).

Dalam implementasinya alokasi dana desa di desa jambangan secara umum memiliki beberapa proses yang mana sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Dalam pengelolaan ADD prinsip partisipasi dengan melibatkan peran serta masyarakat secara langsung dan aktif sebagai penjamin dalam pengambilan keputusan

bersama dengan tujuan untuk pemberdayaan desa dan kemajuan desa. Hasil wawancara dengan bapak untuk selaku kepala desa jambangan bawang.

*“partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan ini sangatlah penting karena kegiatan ini dilakukan untuk memberikan kemandirian dan memberikan masyarakat desa pekerjaan bagi yang belum mempunyai pekerjaan yang mana kegiatan kegiatan tersebut bersumber dari alokasi dana desa yang mana alokasi dana ini memang untuk pemberdayaan masyarakat desa jambangan ini”.* (wawancara dengan bapak untuk selaku kepala desa jambangan bawang. 18 Agustus 2022).

Dana desa di desa jambangan kecamatan bawang kabupaten batang pada setiap tahunnya selalu bertambah. Dikarenakan jumlah warga yang menabuh. Bisa dilihat perolehan dari tahun 2021 alokasi dana desa yang didapatkan yaitu Rp. 827.327.000,-, dan pada tahun ini yaitu naik menjadi Rp. 938.709.000,- jadi setiap tahunnya mak jumlah anggaran dana desa jambangan kecamatan bawang kabupaten btang dari tahun ke tahun meningkat.

Pada tiga tahun sebelumnya di desa jambangan dan desa di alokasikan untuk pembangunan desa berupa pembangunan jalan, gorong-gorong, dan juga pengaspalan jalan utama desa jambangan.

Pada tahun 2021 dana desa juga dialokasikan untuk pembangunan desa walaupun tidak sesuai dengan peraturan daerah nomor 18 tahun 2018 bahwasannya dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat yaitu sekian persen, namun tidak terlaksana dengan lancer dikarenakan di desa jambangan masih sangat membutuhkan pembangunan dalam bentuk fisik khususnya untuk menunjang lancarnya kegiatan ekonomi di desa jambangan kecamatan bawang kabupaten batang. Hasil wawancara engan kaur keuangan desa yaitu bapak ono bahwasannya :

*“dari adanya dana desa yang didapatkan desa jambangan, pemerintah desa menginformasikan kepada masyarakat dengan membuat papan pengumuman agar semua masyarakat desa jambangan mengetahui terkait dana desa yang*

*didapatkana oleh desa dan bisa tahu untuk apa saja penggunaan anggaran desa tersebut. Supaya tidak terjadi salah paham antara pemerintah desa dan masyarakat desa setempat”*. wawancara dengan kaur keuangan bapak ono pada 18 Agustus 2022)

Berdasarkan penjelasan bapak ono selaku kaur keuanagn desa jambangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsip kebijakan anggaran dana desa ini pemerintah sudah melakukan dengan baik. Alah satunya dengan menginformasikan melalui papan pengumuman di tempat yang sering dijangkau oleh masyarakat desa jambangan. Selain itu menurut bapak untung selaku kepala desa jambangan mengatakan.

*“pemberitahuan terkait angaraan yang didapatkan oleh desa tidak hanya diberitahukan melalui papan pengumuman saja, melainkan juga di informasikan pada forum pertemuan dengan tokoh masyarakat dan lembaga masyarakat yang ada terkait kebijakan anggaran”* (wawancara dengan bapak untung selaku kepala desa jambangan pada 18 Agustus 2022).

Berdasarkan analisis wawancara yang dilakukan terkait system pemberitahuan informasi anggaran alokasi dana desa kepada masyarakat yang akan dicanangkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh bapak untung selaku kepala desa jambangan bahwasannya sosialisai anggaran di berikan kepada setiap kelompok kegiatan pemberdayaan masyarakat yang nantinya akan melaksanakan kegiatan. Berikut hasil wawancara dengan bapak untung selaku kepala desa jambangan.

*“pemebritahuan informasi terkait anggaran disosialisasikan sebelum adanya kegiatan dilaksanakan dalam kelompok-kelompok kegiatan yang mendapatkan program. Kita sosialisasikan bahwasannya dana yang didapatkan sekian, seumpamanya anggaran pemberdayaan nantinya mendapatkan seper sekian maka nantinya akan di rincikan”*. (wawancara dengan bapak untung selaku kepala desa jambangan pada 18 Agustus 2022).

Dengan adanya alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat yang mana

banyak kegiatan ataupun program yang dicanangkan yang bersumber dari alokasi dana desa. Alokasi dana desa di desa jambangan merupakan dana perimbangan dari pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang mana digunakan untuk kepentingan desa salah satunya yaitu dalam pemberdayaan masyarakat desa jambangan, yang bertujuan untuk bisa menjadikan masyarakat yang mandiri dan terampil. Hasil wawancara yang didapatkan dari observasi. Berikut hasil wawancara :

*”dari berbagai program kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah desa terkait pemberdayaan masyarakat, jadi kita rencanakan memang untuk memberdayakan masyarakat. Untuk mereka menggali swadaya masyarakat itu memang semua program kegiatan masyarakat itu dikerjakan oleh masyarakat. Kita hanya membantu berwujud bahan dan material saja”.* (wawancara dengan bapak untung selaku kepala desa jambangan pada 18 Agustus 2022).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap pemberdayaan masyarakat di desa jambangan yaitu dengan menyumbangkan tenaga kerja dengan kemampuan masing-masing dan juga berdasarkan perintah dari pemerintah desa jambangan.

Hal tersebut sesuai dengan teori dari Widjaja pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, social, agama dan budaya.

Sama halnya dengan jurnal yang ditulis oleh dwi iriani margayaningsih dalam teori pemberdayaan masyarakat bahwasannya pemberdayaan masyarakat tidak terjadi dengan sendirinya, namun dengan keikutsertaan masyarakat dan partisipasi dari masyarakat dalam menyesuaikan pikiran dan tindakannya dengan perkembangan yang terjadi dan memiliki rasa tanggung jawab.

Dengan adanya alokasi dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan



masyarakat dalam kegiatan maupun program yang dicanangkan oleh pemerintah desa supaya melatih masyarakat agar lebih mandiri, kreatif, dan juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa jambangan. Seperti yang dijelaskan oleh Djaenuri bahwasannya Alokasi Dana Desa adalah dana yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan oprasional pemerintah desa sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan desa.

Terkait penjelasan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya terkait program kegiatan pemebrdayaan masyarakat di desa jambangan kecamatan bawang kabupaten bawang yang telah diterapkan sudah cukup baik terhadap pemberdayaan masyarakat karena sudah adanya beberapaprogram yang berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat desa seperti salah satunya yaitu kegiatan ibu-ibu PKK.

## **B. Faktor Penghambat Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Jambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Batang**

Faktor penghambat dalam implementasi alokasi dana desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat di desa jambangan kecamatan bawang kabupaten batang tentunya terdapat hambatan-hambatan dalam kegiatan maupun dalam proses pelaksanaan untuk mencapai tujuan. Hambatan tersebut dapat berupa hambatan eksternal maupun hambatan internal.

### **Hambatan internal**

Hambatan internal, yaitu hambatan yang berasal dari pemerintahan desa itu sendiri sebagai pelaksana. Adapun hambatan-hambatan dalam proses implementasi alokasi dana desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat desa jambangan kecamatan bawang kabupaten batang.

1. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) pada aparatur pemerintahan desa dalam pengalokasian dana desa.

2. Keterlambatan pembuatan laporan pertanggung jawaban terkait alokasi dana desa (ADD)
3. Kurang pemahaman terkait pentingnya keterbukaan terhadap masyarakat dan juga pertanggung jawaban kepada masyarakat desa.

### **Hambatan eksternal**

Hambatan eksternal, yaitu hambatan yang berhubungan dengan masyarakat desa itu sendiri. Adapun beberapa hambatan yang berasal dari eksternal antara lain :

1. Nominal yang terbilang kecil sangat menyebabkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Masih banyak masyarakat yang kurang menaruh perhatian pada proses implementasi alokasi dana desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat
3. Pencairan dan penyaluran yang tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dari awal menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan terkhusus kegiatan pemberdayaan masyarakat juga ikut terhambat yang mana seharusnya dapat dilaksanakan secara seimbangan.

Sudah dijelaskan diatas,dari beberapa faktor penghambat pelaksanaan ADD kepala desa Jambangan bapak untung, menjelaskan kepada penulis bawah.

*“saya diisni sebagai kepala desa jambangan kecamatan bawang memberikan pendapat terkait hambatan yang sudah dijelaskan diatas dan yang sudah saya temui dalam pelaksanaanADD, seperti yang sudah dijelaskan diatas memang bahwasannya hambatan yang ada yaitu terkait kurangnya partisipasi masyarakat, penyampaian pendapat atau aspirasi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa ini.”* (wawancara dengan bapak untuk kepala desa jambangan kecamatan bawang kabupaten batang, 18 Agustus 2022)

Pernyataan terkait faktor penghambat dalam pelaksanaan ADD yang disampaikan bapak untung selaku kepala desa jambangan juga di dukung oleh kaur keuangan bapak ono,tentang hambatan tersebut yang mana hal tersebut sangat berpengaruh terhadap terselenggaranya program ADD danjuga terhadap keberhasilanpelaksanaannya.

*“sebagaimana yang telah disampaikan oleh beliau tidak sedikit faktor penghambat yang menjadi hambatan pelaksanaan ADD, tidak hanya yang sudah dijelaskan diatas masih ada hambatan lain yang kami rasakan sebagai aparatur desa dan juga pelaksana ADD yaitu begitu banyaknya mekanisme, tahap-tahap mekanisme yang terlalu berbelit-belit dan ribet, juga terlalu banyak birokrasi dalam pencairan dana ADD, sehingga pelaksanaan mengalami keterlambatan.”*  
(wawancara dengan bapak ono kaur keuangan desa jambangan, 18 Agustus 2022)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

Dari yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya terkait Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Jambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. Dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam proses pelaksanaan terkait Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Jambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Batang sudah berjalan cukup baik. Namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu : kurangnya sumber daya manusia (SDM) pada aparatur pemerintahan desa dalam pengalokasian dana desa, Keterlambatan pembuatan laporan pertanggung jawaban terkait alokasi dana desa (ADD), Kurang pemahaman terkait keterbukaan kepada masyarakat dan tanggung jawab kepada masyarakat, Nominal yang terbilang kecil sangat menyebabkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Masih banyak masyarakat yang kurang menaruh perhatian pada proses implementasi alokasi dana desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat., Pencairan dan penyaluran yang tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dari awal menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan terkhusus kegiatan pemberdayaan masyarakat juga ikut terhambat yang mana seharusnya dapat dilaksanakan secara seimbangan.
2. Upaya pemerintah desa Jambangan dalam mengoptimalkan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam program pemberdayaan masyarakat di desa jambangan kecamatan bawang kabupaten batang, mengadakan sosialisai pada masyarakat desa jambangan mengenai keberadaan dan juga fungsi dari alokasi dana desa, memberikan pemahaman kembali kepada pemerintah desa khususnya bagi yang mengelola alokasi dana desa agar lebih terbuka terkait pengimplementasian alokasi dana desa kepada masyarakat, dari pengimplementasian alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat maka pemerintah desa mengajak masyarakat ikut mendukung dan juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang sudah dirancang sebelumnya.

## 2. SARAN

Dari kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas penulis dapat menyarankan untuk terkait Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Jambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Batang sebagai beriku

1. Uapaya pemerintah desa jambangan dalam mengoptimalkan Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Jambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Batang yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat
2. Pemerintah desa jambangan diharapkan dapat meningkatkan kerjasama terhadap masyarakat desa dengan tujuan agar menjadikan desa jambanagn lebih maju dan meningkat dalam halapapun.
3. Dari kegiatan – kegiatan yang ada di desa jambangan bisa lebih dikembangkan lagi untuk memajukan desa jambangan tersebut.
4. Pemerintah desa juga harus ikut aktif dalam kegiatan- kegiatan di desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model – Model Pembedayaan*, (Yogyakarta : Gava Media, 2004), hal. 83..
- Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Prespektif Hukum*, Rajawali P (Jakarta, 2009).176.
- Chabib Sholeh, *Pengelolaan Keuangan Desa*, FOKUS MEDI (Bandung, 2015). hlm.54.
- Dkk Aprilia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 117.
- E. Mulyasa, *Impementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksar, 2013).
- Faizatul Karimah, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat,” *Jurnal Adminitrasi Publik 2*, no. 4 (n.d.): 597–598.
- Galih Wicaksono. dkk. Boedijono, “Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan D an Pemberdayaan Desa,” *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, (2018).
- George C Edwards III, ‘Public Policy Implementing’, ed. Malcolm L et Al Goggin (London-England: Jai Press Inc, 1990), hlm. 1.
- Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2004).
- I Gede Dana Yasa and dan Gede Sandiasa2, “Implementasi Kebijakan Desa Pakraman Dalam Pemberdayaan Masyarakat,” *Locus Majalah Ilmiah 9*, no. 1 (n.d.): 2018.
- Joko Subagyo, ‘Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)’ (Jakarta: PT. Asdi Mahasaty (Cetakan Kelima), 2006), hlm. 63.
- Kementrian Keuangan RI, “*Buku Pintar Dana Desa*”, Jakarta: Kemenkeu, 2017. hlm. 40.
- Kesi Widjajanti, “Model PPemberdayaan Masyarakat,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan 12* (2011): 16.
- Koariah Satori, ‘*Metodologi Penelitian Kualitatif*’ (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 23-24.
- Lina Nasuhaton Nafidah, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat,” in *Jurnal Bisns Dan Manajemen Islam*, vol. 3, 2015, 227.
- M Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah: Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah* (Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 26.
- M.Si. Ir. Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (Makassar, 2018). hlm. 9.

- Merilee S Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World*, in *Politics and Policy Implementation in the Third World* (Princeton University Press, 2017), hlm. 7.
- Mohammad Said Risya Novita Sari, Heru Ribawanto, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Prespektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri),” *Jurusan Administrasi Publik* 3, no. 11 (n.d.): 1880.
- Munawar Noor, “Pemberdayaan Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah CIVIS* 1, no. 2 (2011): 90–91.
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: PT. Tariso Bandung, 2003), hlm. 129.
- Nurdin Usman, ‘Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum,’ 2002.
- PP Nomor, “Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab VIII Pasal 43 AD,” n.d.
- Rauf Hatu, “Pemberdayaan Dan Pendampingan Sosial Dalam Masyarakat,” *Jurnal Inovasi*. vol 7, no. 4 (2010): 241.
- Ray Septianis Kartika, “Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Lokasi Dana Desa (ADD),” *Jurnal Bina Praja* 8, no. 2 (2012): 180.
- Rendal B. and Grace A. Franklin Ripley, “Police Implementation and Bureaucracy,” in *Chicago-Illionis* (the Dorsey Press, 1986), 15.
- S. Nasution, ‘Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif’ (Bandung: PT. Tariso Bandung, 2003), hlm. 72.
- Sugiono, , ‘Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D’ (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 246.
- Sugiono, , ‘Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D’ (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 246.
- Sugiono, ‘Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D, 335.
- Sugiono, ‘Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D’ (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 341.
- Suhartini Arikunto, ‘Prosedur Penelitian’ (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 229.
- Totok Mardikanto dan Purwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. 30-32.
- Vidhyandik Pranata, *Proses Pemberdayaan Masyarakat, raja wali* (Bandung, 1996). hlm. 54.

Yosefa Sayekti Dina Rulyanti, Raden Andi Sularso, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening’, Bisma:” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen 11*, no. 3 (2018): 326.



## LAMPIRAN - LAMPIRAN

### Lampiran draf wawancara

1. Apa Visi dan Misi dari Desa jambangan ?
2. Bagaimana Struktur kepengurusan kantor desa jambangan?
3. Potensi apa saja yang dimiliki desa dalam pemberdayaan masyarakat desa jambangan?
4. Apakah terdapat usaha milik desa di desa jambangan?
5. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa jambangan?
6. Bagaimana system pengelolaan alokasi dana desa?
7. Berapa jumlah Anggaran Alokasi dana desa ditahun 2022?
8. Permasalahan apa saja yang dihadapi dalam Pengalokasian Dana Desa?
9. Bagaimana proses penyaluran Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa jambangan?
10. Hambatan apa saja yang ada dalam proses pengalokasian dana desa
11. Media apa yang biasanya digunakan untuk penyebaran informasi secara menyeluruh kepada pegawai?  
Jb: media yang saya gunakan dalam penyampaian ini ya melalui rapat dengan mengumpulkan seluruh perangkat desa.
12. Apakah pola komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah desa atau Kepala Desa sudah efektif dalam menyampaikan informasi mengenai alokasi dana desa tersebut kepada pegawai?  
Jb: Insya' Allah sudah efektif, karena kalau tidak efektif bagaimana pegawai saya itu mau menyampaikan kepada masyarakat? Karna masyarakat luas ini perlu penjelasan yang jelas dan akurat serta memang bisa dipertanggung jawabkan.
13. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan alokasi dana desa, apakah pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa dan pegawai sudah sangat tepat?  
Jb: Kalau masalah pengawasan ya, kami slalu mengadakan pengawasan kepada pekerjaan atau pelaksanaannya, di sini yang mengikuti pengawasan itu ada lembaga BPD (Badan Perwakilan Desa)

14. Apakah komunikasi yang terjadi antara pegawai dengan Kepala Desa sudah efektif dan berjalan dengan lancar dalam menyampaikan informasi terkait alokasi dana desa?

Jb: Sebenarnya kalau dibilang efektif ya efektif, dibilang tidak ya tidak. Efektif ini karna kebanyakan masyarakat dan kami sebagai perangkat desa ini masih banyak peraturan-peraturan yang belum kami pahami, tapi dalam penyampaian informasi selalu kami terima dengan baik.

Lampiran dokumentasi

Balai Desa Jambangan



Kegiatan ibu-ibu PKK



Kegiatan musyawarah desa



Kegiatan gotong royong membuat jalan



Kegiatan gotong royong membuat saluran air menuju persawahan



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Eva Setiyowati  
Nim : 1801046040  
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam  
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 26 Maret 2000  
Alamat :  
E-mail : evasetiyowati7@gmail.com  
No. Hp : 088806480850  
Riwayat Pendidikan :

1. SDN 03 Bawang
2. MTs. Nu Al Sya'iriyah Plumbon Limpung
3. SMA N 1 Bawang

**Pendidikan Non Formal :**

1. Sekolah Pemberdayaan Tahap Awal
2. Sekolah Pemberdayaan Tahap Lanjut
3. Uji Sertifikasi di LTPT Karanganyar